



**KPKNL
KISARAN**

LAPORAN KINERJA 2023



KPKNL Kisaran
Melayani dengan “CINTA”
Cepat, Inovatif, Normatif, Transparan, Adaptif

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2023, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan kinerja KPKNL Kisaran atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah diberikan kepada KPKNL Kisaran selama tahun 2023.



Laporan Kinerja disusun sebagai implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 dilakukan berdasarkan hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan kontrak kinerja KPKNL Kisaran, Berdasarkan data IKU Kinerja Three pada KPKNL Kisaran Tahun 2023, Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Kisaran adalah sebesar 115,50 % dari 9 Sasaran Strategis (SS) dengan total 20 IKU.

Berbagai pencapaian kinerja tahun 2023, tidak terlepas dari penguatan dan peningkatan sumber daya, dukungan peningkatan kompetensi, sistem informasi manajemen yang terintegrasi serta sinergi yang terjalin dengan baik dengan seluruh pihak-pihak terkait. Pada tahun 2023, KPKNL Kisaran bersama dengan unit vertikal Kementerian Keuangan di wilayah Kab. Asahan dan Kota Tanjungbalai (Kemenkeu SATU) bersinergi guna berperan serta aktif dalam pemberdayaan UMKM dengan mengembangkan Galeri UMKM dan Pusat Oleh-Oleh yang berada di area KPKNL Kisaran. Hal ini merupakan wujud kontribusi nyata Kementerian Keuangan bagi masyarakat dan mendukung perekonomian.

Selain itu, kami juga terus melakukan perbaikan sarana prasarana dan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kinerja serta memberikan layanan kepada seluruh stakeholder dengan melakukan perbaikan secara terus menerus dan motto layanan CINTA (Cepat, Inovatif, Normatif, Transparan dan Adaptif).

Laporan Kinerja Tahun 2023 merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas mandat dan capaian kinerja yang telah ditetapkan, serta menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan umpan balik bagi langkah perbaikan di masa mendatang dan mendorong kami untuk berupaya meningkatkan kinerja KPKNL Kisanan.

Kisanan, 30 Januari 2024
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Agus Budiarta

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), perlu diterapkan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang terdiri dari prinsip/asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Berdasarkan evaluasi kinerja Tahun 2023 terhadap Kontrak Kinerja KPKNL Kisaran yang terdiri dari 9 Sasaran Strategis (SS) dan 20 IKU, sebanyak 19 IKU berstatus hijau (memenuhi ekspektasi) dan 1 IKU berstatus kuning (tidak memenuhi ekspektasi) dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 115,50%. Pencapaian target dan realisasi IKU tahun 2023 secara ringkas diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Sasaran Strategis	Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Max
Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	139,95%	120,00%
	1b-CP	Persentase produktivitas lelang	80%	131,25%	120,00%
	1c-CP	Indeks integritas	88,67	89,17	100,56%
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	140,13%	120,00%
	2b-CP	Persentase penurunan outstanding piutang negara	100%	209,73%	120,00%
Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	3a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan standar barang dan standar kebutuhan	68%	74,62%	108,43%
	3b-CP	Persentase barang milik negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	178,26%	120,00%
	3c-CP	Persentase penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%	125,00%	120,00%
Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	4a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	25%	0,00%	120,00%
Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif	5a-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	94%	100%	106,38%
	5b-CP	Persentase pelaksanaan permohonan lelang online	86%	100%	116,28%

	5c-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100%	123,33%	120,00%
Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	6a-CP	Tingkat tindak lanjut persetujuan pengelolaan barang milik negara	86%	97,14%	112,96%
Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif	7a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	120%	120,00%
Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	101,44	101,44%
	8b-CP	Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	15%	0%	120,00%
	8c-N	Persentase kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	100%	120%	120,00%
Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif	9a-CP	Indeks pengawasan dan pengendalian yang efektif	60	97	120,00%
	9b-CP	Indeks pengelolaan kinerja dan kualitas manajemen risiko	80	99,67	120,00%
	9c-N	Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK	100	90,00	90,00%

Penjabaran terkait Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama KPKNL Kisaran akan tergambar pada setiap bab dalam Laporan Kinerja ini.

BAB I PENDAHULUAN

A. Umum

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai salah satu unit di lingkungan Kementerian Keuangan mempunyai peran strategis dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang. Peran dan tugas yang diamanahkan kepada DJKN tersebut dilaksanakan secara *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN).

Kantor Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran sebagai salah satu instansi vertikal yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara juga bertanggungjawab menyusun LAKIN Tahun 2023 sebagai pertanggungjawaban KPKNL Kisaran dalam pencapaian tujuan/sasaran strategis organisasi. Berikut ini gambaran umum dari KPKNL Kisaran sebagai instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang meliputi tugas pokok dan fungsi organisasi, struktur organisasi dan peran strategis KPKNL Kisaran.

B. Tugas dan Fungsi

KPKNL Kisaran merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Adapun tugas dan fungsi KPKNL sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 adalah melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, KPKNL menyelenggarakan fungsi:

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara.
2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara.

3. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara.
4. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara.
5. pelaksanaan pelayanan penilaian
6. pelaksanaan pelayanan lelang
7. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang
8. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang
9. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
10. pelaksanaan administrasi KPKNL

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala KPKNL Kisaran senantiasa berpegang teguh pada visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yaitu:

“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

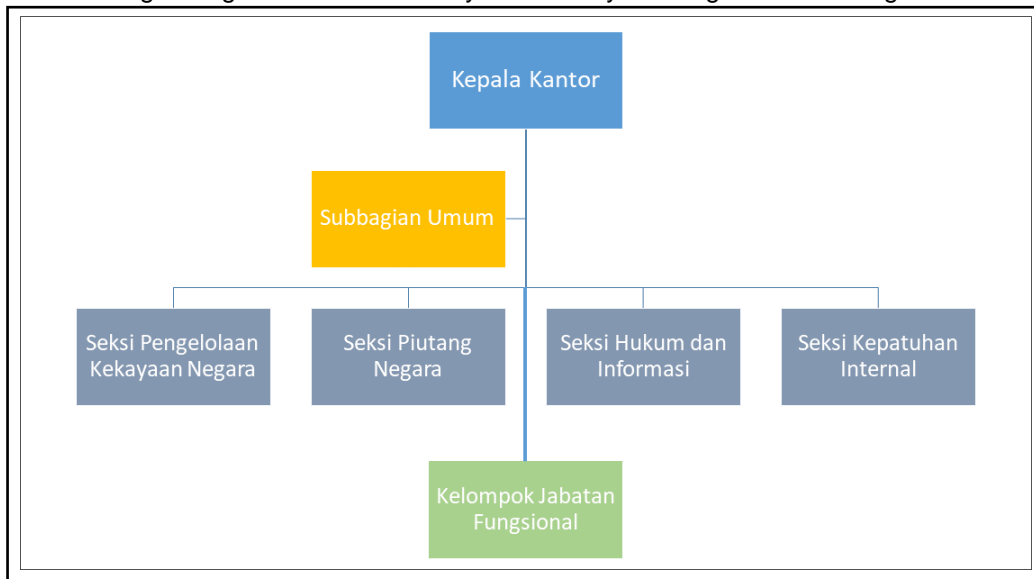
C. Struktur Organisasi KPKNL Kisaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, susunan organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran terdiri dari:

1. Subbagian Umum
2. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara
3. Seksi Piutang Negara
4. Seksi Hukum dan Informasi
5. Seksi Kepatuhan Internal
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan susunan organisasi KPKNL Kisaran disajikan dalam gambar 1.1 sebagai berikut.

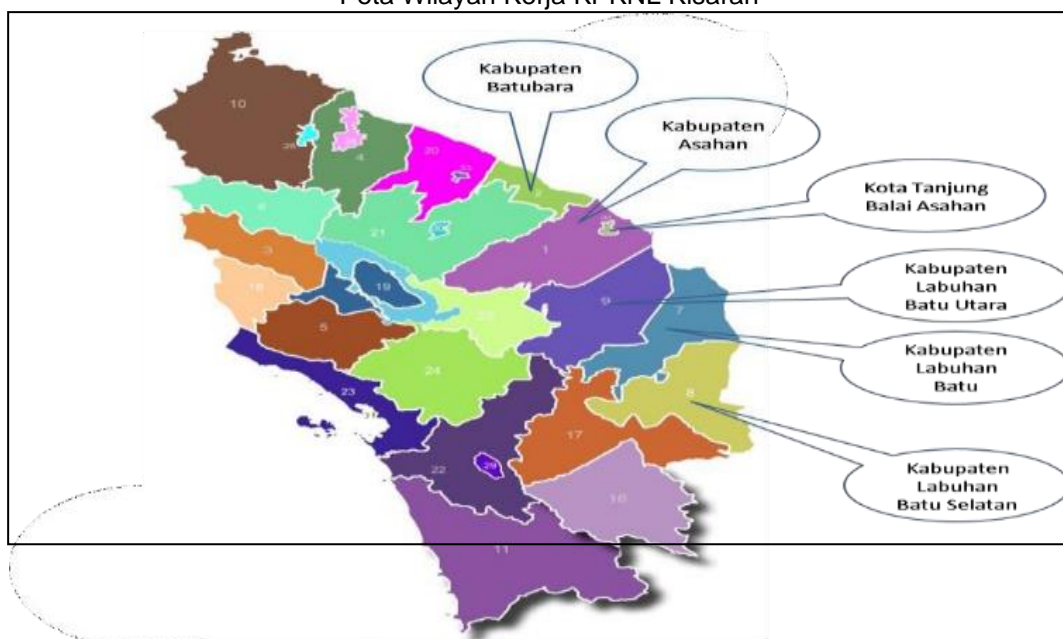
Gambar 1.1
 Bagan Organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kisaran



Wilayah kerja KPKNL Kisaran KPKNL Kisaran terdiri dari 1 (satu) kota dan 5 (lima) kabupatenyaitu:

1. Kabupaten Asahan
2. Kabupaten Labuhanbatu Utara
3. Kota Tanjungbalai
4. Kabupaten Labuhanbatu Selatan
5. Kabupaten Labuhanbatu
6. Kabupaten Batubara

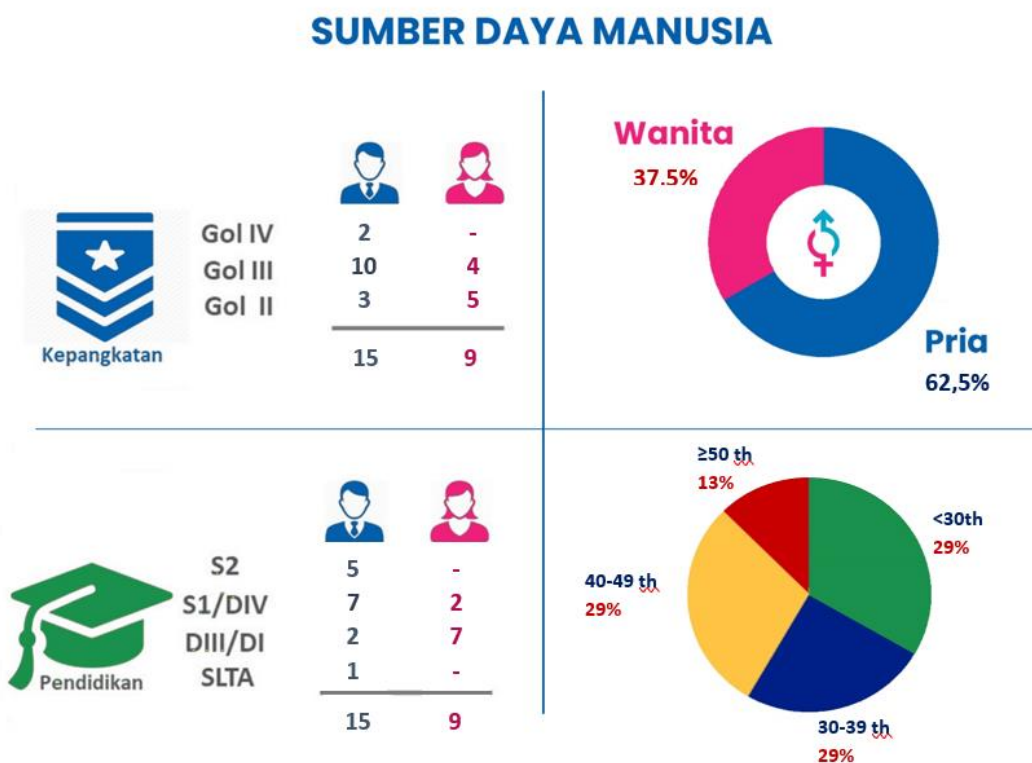
Gambar 1.2
 Peta Wilayah Kerja KPKNL Kisaran



KPKNL Kisaran didukung oleh 24 orang pegawai dari berbagai bidang keahlian seperti

ekonomi, akuntansi, manajemen, hukum, dan lainnya. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat jabatan, golongan, pendidikan, dan gender adalah sebagai berikut:

Gambar 1.3
Komposisi Pegawai KPKNL Kisaran Berdasarkan Jabatan dan Golongan



D. Isu dan Peran Strategis

Sebagai organisasi yang memiliki fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang, KPKNL Kisaran memiliki peran strategis sebagai berikut:

a. Pengelolaan Kekayaan Negara

Sebagai pengelola kekayaan Negara, KPKNL Kisaran turut berperan dalam mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan daya guna dan hasil guna terutama difokuskan pada pemanfaatan kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara dan penatausahaan kekayaan negara. Selain itu KPKNL Kisaran selaku asset manager mengemban tugas menata manajemen aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN, yaitu melalui optimalisasi aset dalam peningkatan pendapatan negara dan penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan.

b. Penilaian

Penilaian terhadap Kekayaan Negara yang merupakan langkah awal dari proses

pengelolaan kekayaan negara setelah dilakukan inventarisasi dilakukan untuk menuju optimalisasi pengelolaan kekayaan negara. Tugas penilaian kekayaan negara meliputi kegiatan standarisasi, bimbingan teknis, analisis, supervisi, evaluasi dan rekomendasi dibidang penilaian. Kegiatan penilaian tersebut dimaksudkan untuk memperoleh estimasi atau perkiraan nilai wajar dari setiap kekayaan negara berupa tanah, bangunan, kendaraan dan barang milik negara lainnya yang berada pada lingkup Kementerian/Lembaga Negara. Kegiatan penilaian dilakukan untuk kepentingan pengambilan keputusan pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN. Dengan demikian pengelolaan kekayaan negara menjadi optimal, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *The Highest and Best Use*.

c. Pelayanan Lelang

Pelayanan lelang bertujuan untuk menjadikan lelang sebagai sarana transaksi penjualan aset secara umum, sebagaimana fungsi pasar pada umumnya. Selain itu, lelang merupakan pelaksanaan eksekusi terhadap suatu putusan/penetapan pengadilan maupun PUPN. Lelang mempunyai manfaat nilai lebih dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu lebih transparan, akuntabel, efisien dan dapat lebih menjamin kepastian hukum. Risalah Lelang yang merupakan akta otentik bertungsi sebagai akta van transport untuk kepentingan peralihan hak. DJKN dinarapkan menjadi akselerator agar paradigma lelang meresap kedalam "mindset" masyarakat, sehingga memandang lelang seperti pelaksanaan jual beli biasa dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Setelah berlakunya PMK Nomor 90/PMK 06/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang dengan Penawaran Secara Tertulis Tapa Kenadiran Peserta Lelang Melalui Internet, lelang dapat dilaksanakan tanpa kehadiran peserta lelang. Hal ini tentu saia semakin memudahkan siapa saja untuk ikut menjadi peserta lelang.

d. Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pembiayaan APBN

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diterima oleh KPKNL Kisaran adalah penerimaan yang berasal dari pemanfaatan BMN. Biaya Administrasi (Biad) Pengurusan Piutang Negara merupakan hasil dan pelayanan pengurusan piutang negara yang diterima oleh KPKNL. Sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL memperoleh hasil berupa Bea Lelang. Kedua instrumen penerimaan tersebut selanjutnya disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

E. Sistematika Laporan

1. Ringkasan Eksekutif

Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta langkah antisipatifnya

2. Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

3. Bab II. Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2023.

4. Bab III. Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja KPKNL Kisaran untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis. Setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan dengan cara:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja s.d. tahun 2021 dengantahun 2023;
- 3) Menganalisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 4) Menganalisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 5) Menganalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran untuk mewujudkan kinerja KPKNL Kisaran sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

5. Bab IV. Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja KPKNL Kisaran serta langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja pada tahun 2023 yang akan datang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam melaksanakan perencanaan kinerja, KPKNL Kisaran berpedoman pada Rencana Strategis DJKN Tahun 2020 – 2024 yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020. Rencana strategis tersebut memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis dan digunakan untuk mengantisipasi kondisi masa depan sehingga dapat mencapai target yang diinginkan. KPKNL Kisaran memiliki visi yang sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk tahun 2020-2024 yaitu:

'Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat'.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, maka KPKNL Kisaran menetapkan misi seperti yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yaitu:

1. Mengoptimalkan pengelolaan pengelolaan kekayaan negara.
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah.
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Penjabaran atas misi tersebut ditetapkan dalam suatu bentuk tujuan yang memiliki korelasi dengan misi yang telah dinyatakan sebelumnya. Tujuan KPKNL Kisaran sebagaimana tujuan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
- b. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
- c. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;
- d. Birokrasi dan layanan public DJKN yang agile, efektif, dan efisien;

Dalam kurun waktu 2020-2024, KPKNL Kisaran mempunyai arah kebijakan yang dapat mendorong peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara, piutang dan lelang secara profesional dan akuntabel demi terwujudnya visi dan misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Arah kebijakan dan strategi KPKNL Kisaran tahun 2020-2024 dalam

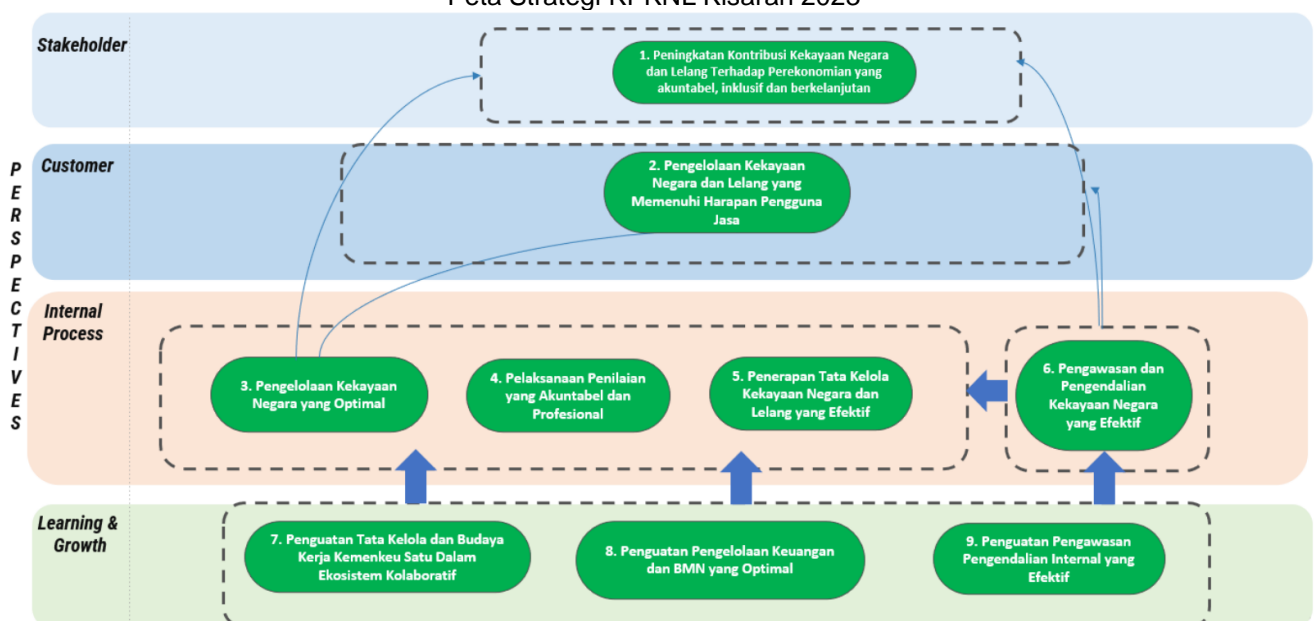
rangka mendukung pencapaian tujuan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan social adalah:
 - Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif, dan optimal;
 - Pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, social, dan lainnya.
- b. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan lelang yang modern dan terpercaya adalah pengelolaan lelang yang optimal.
- c. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien adalah penilaian yang berkualitas.
- d. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien adalah:
 - Organisasi dan SDM yang optimal;
 - Pengawasan dan pengendalian yang bernilai tambah;
 - Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
 - Komunikasi public yang efektif.

B. Perjanjian Kinerja

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, perjanjian kinerja dirumuskan dalam sasaran strategi KPKNL Kisaran Tahun 2023 yang tertuang dalam bentuk peta strategi KPKNL Kisaran.

Gambar 2.1
Peta Strategi KPKNL Kisaran 2023



Berdasarkan *Strategy Map* Kemenkeu-Three, KPKNL Kisaran pada tahun 2023 menerapkan 4 perspektif, 9 Sasaran Strategis (SS) dengan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). Berikut ini merupakan Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) KPKNL Kisaran beserta target yang telah ditetapkan untuk tahun 2023.

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja KPKNL Kisaran Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Kode	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%
		1b-CP	Persentase produktivitas lelang	80%
		1c-CP	Indeks integritas	88,67
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%
		2b-CP	Persentase penurunan outstanding piutang negara	100%
3.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	3a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan standar barang dan standar kebutuhan	68%
		3b-CP	Persentase barang milik negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		3c-CP	Persentase penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
4.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	4a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	25%
5.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif	5a-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	94%
		5b-CP	Persentase pelaksanaan permohonan lelang online	86%
		5c-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100%
6.	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	6a-CP	Tingkat tindak lanjut persetujuan pengelolaan barang milik negara	86%
7.	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif	7a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
8.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal	8a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100
		8b-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%
		8c-N	Persentase kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	100%
9.	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif	9a-CP	Indeks pengawasan dan pengendalian yang efektif	60
		9b-CP	Indeks pengelolaan kinerja dan kualitas manajemen risiko	80
		9c-N	Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK	100

Stakeholder

Merupakan perspektif yang berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh stakeholder. Dalam perspektif ini terdapat 1 sasaran strategis :

Sasaran Strategis 1 : Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan

Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, KNL, dan KND. Selain itu, yang termasuk kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang.

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila asset tetap terutilisasi sepenuhnya (zero idle), adanya nilai tambah BMN berupa penghematan (cost saving) dan PNBP (revenue generating), tingginya turn over penggunaan BMN persediaan, serta mendatangkan manfaat ekonomi.

Sasaran strategis ini terdiri dari 3 IKU sebagaimana disajikan dalam tabel 2.2

Tabel 2.2
IKU KPKNL Kisaran pada SS.1

Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.1. Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	%	100
1.2. Persentase produktivitas lelang	%	80
1.3. Indeks integritas	Indeks	88,67

Customer Perspective

Sasaran Strategis 2 : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

Kegiatan Pengelolaan Kekayaan yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaian untuk mengimbangi harapan konsumen ketika menggunakan layanan kekayaan negara.

Sasaran strategis ini terdiri dari 2 IKU sebagaimana disajikan dalam tabel 2.3

Tabel 2.3
IKU KPKNL Kisaran pada SS.2

Indikator Kinerja	Satuan	Target
2.1. Persentase realisasi pokok lelang	%	100
2.2. Persentase penurunan outstanding .piutang negara	%	100

Internal Process Perspective

Berisi proses bisnis seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Adapun sasaran strategis dalam perspektif ini adalah :

Sasaran Strategis 3 : Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal

Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (good governance) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna.

Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian.

- a. Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila: Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (zero idle)
- b. Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (cost saving) dan PNBP (revenue generating).
- c. Tingginya turn over penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum)
- d. Adanya manfaat ekonomi (selain cost saving dan revenue), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat.
- e. Aset tertib administrasi, fisik dan hukum
- f. Piutang negara terselesaikan dengan optimal.

Sasaran strategis ini terdiri dari 3 IKU sebagaimana disajikan dalam tabel 2.4

Tabel 2.4
IKU KPKNL Kisaran SS. 3

Indikator Kinerja		Satuan	Target
3.1.	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan standar barang dan standar kebutuhan	%	68
3.2.	Persentase barang milik negara berupa tanah yang disertipikatkan	%	100
3.3.	Persentase penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	%	100

Sasaran Strategis 4 : Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

Penilaian yang akuntabel dan profesional adalah pelaksanaan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi prinsip-prinsip penilaian.

Sasaran strategis ini terdiri dari 1 IKU sebagaimana disajikan dalam tabel 2.5.

Tabel 2.5
IKU KPKNL Kisaran pada SS.4

Indikator Kinerja	Satuan	Target
4.1 Deviasi ketergunaan hasil penilaian	%	25

Sasaran Strategis 5 : Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektivitas tercapainya tujuan organisasi. Dalam kaitannya dengan kekayaan negara, kegiatan tata kelola meliputi seluruh siklus pengelolaan BMN, KNL, KND, penilaian, piutang negara, dan lelang. Siklus tersebut diataranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian. Tata kelola yang akuntabel adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (good governance) serta tunduk pada peraturan yang berlaku, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

Sasaran strategis ini terdiri dari 3 IKU sebagaimana disajikan dalam tabel 2.6.

Tabel 2.6.
IKU KPKNL Kisaran pada SS.5

Indikator Kinerja	Satuan	Target
5.1. Persentase pelaksanaan lelang <i>e-auction</i> dan <i>e-conventional auction</i>	%	94
5.2. Persentase pelaksanaan permohonan lelang online	%	86
5.3. Persentase evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	%	100

Sasaran Strategis 6 : Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku.

Pengendalian merupakan tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala.

Pengendalian dan pengawasan pengelolaan BMN dapat dikatakan efektif apabila memenuhi parameter sebagai berikut:

- a. terselesaikannya sengketa/permasalahan pengelolaan BMN yang ada serta menurunnya potensi permasalahan terkait BMN di masa mendatang.
- b. Temuan aparat pemeriksa tuntas ditindaklanjuti
- c. Tidak ada temuan material/fraud terkait pengelolaan BMN
- d. Surat persetujuan pengelolaan BMN pada unit pengguna barang ditindaklanjuti.

Sasaran strategis ini terdiri dari 1 IKU sebagaimana disajikan dalam tabel 2.7.

Tabel 2.7
IKU KPKNL Kisaran pada SS.6

Indikator Kinerja	Satuan	Target
6.1 Tingkat tindak lanjut persetujuan pengelolaan barang milik negara	%	86

Learning and Growth Perspective

Berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan proses bisnis seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Adapun sasaran strategis dalam perspektif ini adalah

Sasaran Strategis 7 : Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif

Penguatan tata Kelola dan budaya kerja Kemenkeu merupakan merupakan langkah mewujudkan mekanisme pengelolaan kinerja baru yang lebih dinamis dan kolaboratif sehingga kinerja pegawai Kementerian Keuangan lebih optimal dan efisien dalam bidang organisasi, SDM, dan Kehumasan Kemenkeu untuk berhasil mewujudkan percepatan implementasi ekosistem kehumasan Kemenkeu Satu yang berfokus pada organisasi yang *fit to purpose* SDM yang profesional, serta kehumasan yang masif.

Sasaran strategis ini terdiri dari 1 IKU sebagaimana disajikan dalam tabel 2.8

Tabel 2.8
IKU KPKNL Kisaran pada SS.7

Indikator Kinerja	Satuan	Target
7.1. Persentase pengembangan kompetensi pegawai	%	100

Sasaran Strategis 8 : Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal

Penguatan fungsi pengelolaan keuangan dan BMN dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi.

Salah satu sumber daya organisasi sektor publik adalah anggaran. Anggaran yang tersedia harus dikelola dengan berkualitas yang ditandai dengan anggaran terserap sesuai rencana yang telah ditetapkan, tercapainya output, efisiensi, konsistensi pelaksanaan anggaran, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen yang dipakain dalam pengelolaan anggaran adalah DIPA, yaitu dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja.

Sasaran strategis ini terdiri dari 3 IKU sebagaimana disajikan dalam tabel 2.9

Tabel 2.9
IKU KPKNL Kisaran pada SS.8

Indikator Kinerja	Satuan	Target
8.1 Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	Indeks	100
8.2 Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	%	15
8.3 Persentase kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	%	100

Sasaran Strategis 9 : Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan mengikuti prosedur/ketentuan yang berlaku. Pengendalian merupakan tindakan preventif dan korektif yang dilaksanakan apabila dari hasil pengawasan ditemukan adanya penyimpangan atau kendala.

Pengendalian dan pengawasan pengelolaan BMN dapat dikatakan efektif apabila memenuhi parameter sebagai berikut:

- Terselesaikannya sengketa/permasalahan pengelolaan BMN yang ada serta menurunnya potensi permasalahan terkait BMN di masa mendatang.
- Temuan aparat pemeriksa tuntas ditindaklanjuti
- Tidak ada temuan material/fraud terkait pengelolaan BMN
- Surat persetujuan pengelolaan BMN pada unit pengguna barang ditindaklanjuti.

Sasaran strategis ini terdiri dari 3 IKU sebagaimana disajikan dalam tabel 2.10

Tabel 2.10
IKU KPKNL Kisaran pada SS.9

Indikator Kinerja	Satuan	Target
9.1. Indeks pengawasan dan pengendalian yang efektif	Indeks	60
9.2. Indeks pengelolaan kinerja dan kualitas manajemen risiko	Indeks	80
9.3. Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK	Indeks	100

C. Pengukuran Kinerja

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja tahun 2023, KPKNL Kisaran berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%;
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi maximize semua agar sebanding dengan yang lainnya;
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU;
4. IKU yang ditetapkan, diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target;
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi 120%
 - b. Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.

BAB III

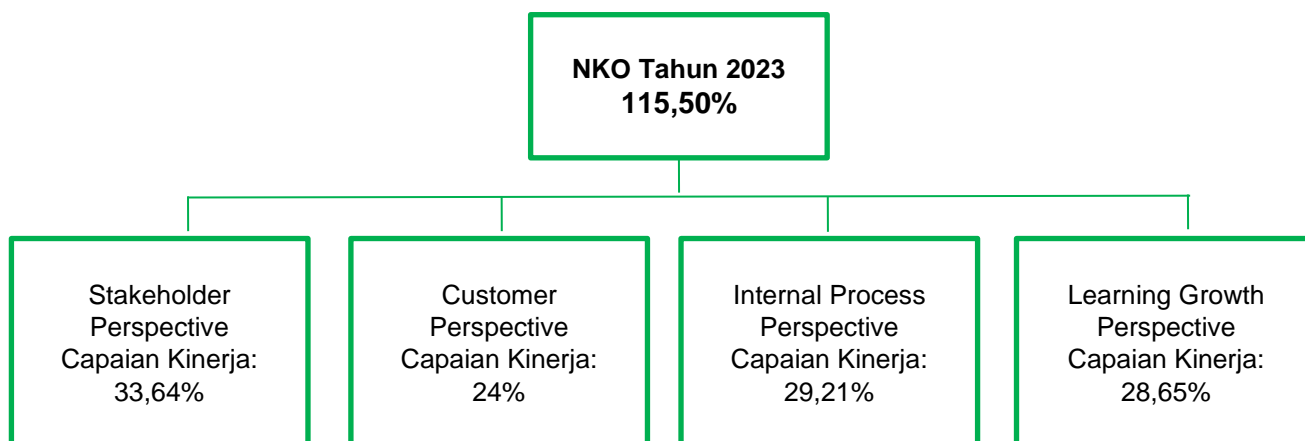
AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai capaian kinerja KPKNL Kisaran pada tahun 2023, yang dilengkapi dengan penjelasan/narasi tentang target, realisasi dan evaluasi untuk masing-masing IKU. Kemudian akan diuraikan juga mengenai alokasi dan sumber pembiayaan beserta realisasi anggaran untuk membiayai program yang dijalankan, yang disertai dengan penjelasan mengenai realisasi anggaran.

A. Capaian Kinerja Organisasi

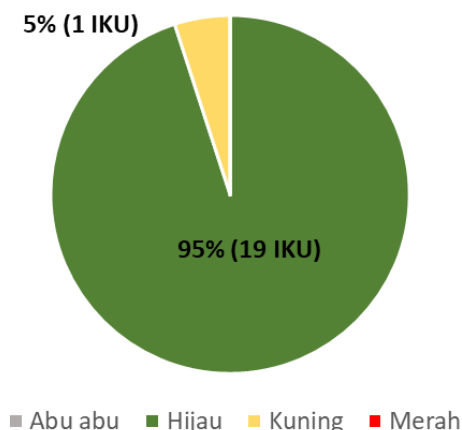
Pengukuran capaian kinerja KPKNL Kisaran tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Kisaran tahun 2023 adalah sebesar 115,50%, dengan rincian nilai pada masing-masing perspektif sebagai berikut :

Gambar 3.1
Bagan capaian NKO per perspektif



Selama tahun 2023, dari total 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) KPKNL Kisaran, terdapat 19 IKU berstatus hijau dan 1 IKU berstatus kuning sebagaimana pada gambar 3.2.

Gambar 3.2
Diagram capaian IKU KPKNL Kisaran



Berikut penjelasan dari setiap capaian IKU yang merupakan evaluasi dan analisis kinerja atas 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dicapai KPKNL Kisaran pada tahun 2023 sesuai dengan *Strategy Map* Kemenkeu-*Three* KPKNL Kisaran.

1. (1a-CP) Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Tabel 3.1
Rincian Persentase Target dan Realisasi
Penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	139,95%	139,95%

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Pasal 28 tentang Kementerian Keuangan, menjelaskan bahwa ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara meliputi pengelolaan barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang.

Penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang merupakan nilai penerimaan negara yang telah masuk ke kas negara dan nilai penghematan belanja yang diperoleh dari hasil pengelolaan kekayaan negara dan lelang.

Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang pada lingkup instansi vertikal berasal dari:

- a. PNBP Pengelolaan BMN
 - penerimaan dari hasil pemanfaatan maupun penjualan BMN pada K/L
- b. PNBP Piutang Negara (PNBP PN)
 - penerimaan dari pengurusan piutang negara
- c. PNBP Lelang (PNBP Lelang)
 - bea lelang;
 - bea lelang pegadaian;
 - denda keterlambatan penyetoran bea lelang oleh PL Kelas II/Balai Lelang;
 - biaya permohonan lelang;
 - penerimaan dari uang jaminan pembeli wanprestasi;
 - pemberian izin operasional Balai Lelang;
 - pengangkatan dan perpanjangan PL Kelas II;
 - perolehan kertas sekuriti oleh PL Kelas II, dan
 - penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang.

Berdasarkan komponen tersebut, realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang adalah sebesar Rp8.450.033.384 dari target sebesar Rp6.066.997.629 atau dalam capaian persentase sebesar 139,28% dengan rincian per masing-masing komponen, sebagai berikut :

Tabel 3.2
Rincian Target dan Realisasi per komponen capaian
Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang Tahun 2023 (dalam rupiah)

Jenis Capaian	Target	Realisasi	%
Capaian PNBP Pengelolaan BMN	4.174.315.656	5.852.601.177	140,21%
Capaian PNBP PN	1.000.000	1.207.770	120,78%
Capaian PNBP Lelang	1.891.681.973	2.636.724.717	139,39%
Total	6.066.997.629	8.490.533.664	139,95%

Kendala dalam pencapaian target IKU persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang selama periode tahun 2023, yaitu:

- a. persetujuan sewa/penjualan yang tidak ditindaklanjuti oleh satker;
- b. alamat debitur yang telah pindah dan tidak jelas

- c. tidak adanya itikad baik dari debitur untuk menyelesaikan hutang dan debitur tidak mengakui hutangnya;
- d. beberapa debitur telah meninggal dunia dan keberadaan ahli waris tidak diketahui.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyelesaian target IKU dimaksud pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan satker yang berpotensi terhadap PNBPN untuk mendorong Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMN;
2. Penyampaian surat himbauan untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN agar satuan kerja mengajukan
3. Melakukan monitoring terhadap satker yang telah memperoleh Surat Persetujuan Pemanfaatan BMN.
4. Pembinaan kepada Satuan Kerja melalui surat untuk melaksanakan penjualan BMN dalam kondisi RB melalui lelang.
5. Optimalisasi pengurusan piutang negara dengan meningkatkan tahap pengurusan piutang negara;
6. Penelitian dan penagihan langsung ke lapangan;
7. Penyelesaian hutang dengan keringanan melalui mekanisme crash program;
8. Peningkatan tahap pengurusan melalui pengurusan piutang sederhana;
9. Edukasi dan komunikasi terhadap penyerah piutang.
10. Penggalan potensi lelang.
11. Edukasi dan komunikasi permohonan dan pelaksanaan lelang kepada stakeholders.

Isu Utama dan Implikasi (apa yang terjadi dan implikasinya?):

1. S.d. Triwulan IV capaian IKU Persentase pengelolaan kekayaan negara dan lelang sebesar 139,95%.
2. Capaian atas IKU persentase pengelolaan kekayaan negara dan lelang telah melampaui target *trajectory* (tahunan).
3. Dalam rangka menghadapi target tahun 2023 perlu adanya rencana yang matang, peningkatan koordinasi dengan kantor pelayanan, dan bidang-bidang terkait.

Akar Masalah: Dari sisi capaian PNBPN pengelolaan BMN, target telah terlampaui, namun demikian capaian tersebut dapat lebih dioptimalkan jika harga sewa (seperti: kantin dan ATM) dan harga jual lelang serta seluruh persetujuan sewa/penjualan segera ditindaklanjuti oleh satker. Terhadap pencapaian PNBPN Lelang dan Piutang, telah melampaui target dengan melakukan penggalan potensi Lelang dan optimalisasi upaya penagihan piutang negara.

Rekomendasi Rencana Aksi untuk tahun 2023:

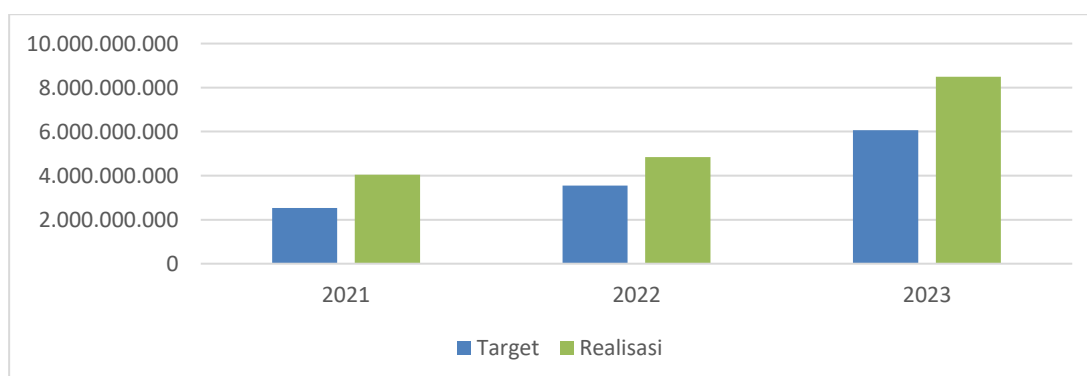
- a. Melakukan penggalian potensi PNBPN dari pengelolaan BMN.
- b. Melakukan 'jemput bola' untuk usulan sewa dan penjualan BMN pada satker yang memiliki potensi.
- c. Melakukan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMN Kewenangan KPKNL.
- d. Peningkatan proses tahapan pengurusan piutang Negara termasuk pemberitahuan surat paksa atas 3 BKPN penyerahan 2023;
- e. Clustering BKPN dan memilah yang potensial;
- f. Penggalian potensi piutang ke pemerintah kabupaten ke wilayah kerja KPKNL Kisaran;
- g. Melakukan penelitian lapangan dan penagihan langsung ke debitur
- h. Peningkatan proses tahapan pengurusan piutang Negara termasuk pemberitahuan surat paksa atas 8 (delapan) BKPN penyerahan 2023.
- i. Penggalian potensi lelang.

Data historis target dan realisasi IKU persentase pengelolaan kekayaan negara dan lelang pada KPKNL Kisaran tahun 2021 s.d. 2023 disajikan dalam tabel dan diagram di bawah ini:

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang
Periode Tahun 2021 s.d. 2023

Uraian	2021	2022	2023
Target	2.535.000.000	3.555.000.000	6.066.997.629
Realisasi	4.037.676.951	4.846.352.271	8.490.533.664

Gambar 3.3
Diagram Perbandingan Target dan Realisasi
Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang
Periode Tahun 2021 sd. 2023



2. (1b-CP) Persentase Produktifitas lelang

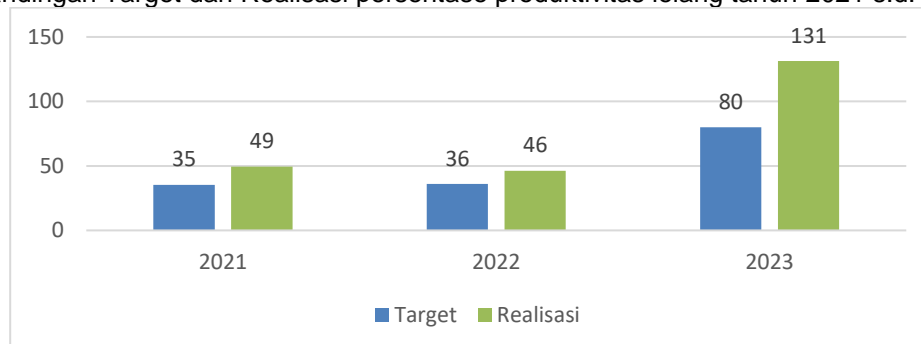
Pelaksanaan lelang yang optimal dapat teridentifikasi dari hasil lelang yang kompetitif dengan terjualnya barang yang dilelang minimal sesuai dengan harga dasar/limit lelang dan memberikan kontribusi bagi penerimaan negara. Salah satu aspek penting dalam proses tersebut adalah dengan menetapkan jumlah frekuensi lelang dimana makin banyak frekuensi lelang maka potensi kontribusi penerimaan negara pun makin besar. Adapun indikator ini diukur dengan jumlah risalah lelang yang diterbitkan oleh pejabat lelang selama tahun 2023. Adapun frekuensi lelang secara keseluruhan pada tahun 2023 berjumlah 705 dengan frekuensi lelang laku secara keseluruhan berjumlah 221.

Tabel 3.4
Rincian Target dan Realisasi
Persentase Produktifitas Lelang Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase produktivitas lelang	80%	131,25%	164,06%

Data historis target dan realisasi IKU persentase produktivitas lelang tahun 2021 s.d. 2023 disajikan dalam table 3.5

Gambar 3.4
Perbandingan Target dan Realisasi persentase produktivitas lelang tahun 2021 s.d. 2023



Tabel 3.5
Perbandingan Target dan Realisasi persentase produktivitas lelang tahun 2021 s.d. 2023

Uraian	2021	2022	2023
Target	35,38%	36%	80%
Realisasi	49,45%	46,26%	131,25%
Kinerja (%)	141,29%	128,49%	164,06%

Adapun kendala-kendala yang dihadapi sama dengan indikator kinerja terkait dengan persentase produktivitas lelang.

Isu utama dan implikasi:

Untuk periode Tahun 2023, target yang ditetapkan untuk IKU ini akan lebih menantang,

sehingga perlu dilakukan mitigasi untuk triwulan berikutnya agar kinerja dapat ditingkatkan

Akar masalah : Potensi lelang TAP

Rekomendasi rencana aksi : Melakukan koordinasi dengan pemohon lelang

3. (1c-CP) Indeks integritas

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi.

IKU ini bertujuan untuk menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal). Adapun target dan realisasi dari IKU Indeks Integritas Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.6
Rincian Target dan Realisasi Indeks Integritas Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Indeks Max
Persentase pokok lelang	88,67	89,17	100,56%

Berdasarkan hasil survei dan faktor koreksi serta apresiasi sesuai dengan manual IKU, diperoleh capaian realisasi sebesar 89,17.

4. (2a-CP) Persentase realisasi pokok lelang

Pada tahun 2022, komponen IKU persentase hasil lelang diperoleh dari persentase realisasi jumlah pokok lelang kelas I dan pegadaian. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif. Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I dan Pegadaian dalam periode tertentu.

Adapun target jumlah pokok lelang pada tahun 2023 pada KPKNL Kisaran adalah sebesar Rp65.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp90.935.384.539, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.7
Rincian Target dan Realisasi
Persentase Realisasi Pokok Lelang Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase penurunan outstanding piutang negara	65.0000.000	91.086.791.539	140,13%

Dalam pencapaian tersebut khususnya pelaksanaan lelang di lingkup KPKNL Kisaran, terdapat kendala yang dihadapi, yaitu:

- Kurangnya jenis barang yang dijual lelang dengan potensi membentuk harga yang tinggi.
- Jumlah barang terjual masih lebih sedikit dibanding barang tidak ada peminat.
- Frekuensi lelang noneksekusi sukarela yang belum optimal.

Dalam mengatasi kendala tersebut, telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Melakukan sosialisasi ke beberapa instansi/perusahaan potensial untuk mengenalkan lelang kepada masyarakat.
- Melakukan sosialisasi dan penggalian potensi lelang kepada instansi yang dinilai potensial.
- Melakukan sosialisasi dan penggalian potensi lelang kepada instansi yang memiliki barang dengan potensi nilai jual yang tinggi.
- Memperluas jangkauan sosialisasi dan meningkatkan dialog dengan masyarakat, khususnya mengenai kelebihan lelang agar menumbuhkan keinginan masyarakat untuk menggunakan jasa penjualan lelang.

5. (2b-CP) Persentase penurunan outstanding piutang negara

IKU Persentase Jumlah Penurunan Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara yang ditandai dengan adanya penurunan outstanding BKPN (nilai saldo piutang negara). Data tersebut diperoleh dari Aplikasi FocusPN. Data target masing-masing Kanwil/KPKNL berdasarkan outstanding masing-masing KPKNL di wilayahnya.

Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh BKPN yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen:

- PNDS/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran atau Pelunasan)
- Penarikan
- Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) termasuk koreksi karena kesalahan pencatatan
- PSBDT
- Keringanan hutang yang dilunasi tahun berjalan, termasuk didalamnya apabila ada penyelesaian piutang negara melalui asset *debt swap*.

Berikut target dan realisasi IKU persentase penurunan outstanding piutang negara.

Tabel 3.8
Rincian Target dan Realisasi
Persentase Realisasi Pokok Lelang Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase penurunan outstanding piutang negara	133.000.000	278.940.473	209,73%

Data historis target dan realisasi IKU Pokok Lelang pada KPKNL Kisaran tahun 2021 s.d. 2023 disajikan dalam tabel dan diagram berikut ini:

Tabel 3.9
Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara
Periode Tahun 2022 s.d. 2023

Uraian	2022	2023
Target	250.000.000	133.000.000
Realisasi	2.675.626.275	278.940.473
Persentase Kinerja	1070,25%	209,73%

Jumlah penurunan outstanding yang menjadi target KPKNL Kisaran adalah Rp133.000.000. KPKNL Kisaran berhasil menghimpun penurunan outstanding Rp278.940.473,00 (209,73%). Jumlah tersebut diperoleh dari pelunasan sebanyak 3 BKPN, dan pengurusan piutang negara melalui tahapan PSBDT sebanyak 12 BKPN. Capaian tingkat penurunan outstanding piutang negara tahun 2023 telah melampaui target yang ditetapkan dalam kontrak kinerja dengan memaksimalkan upaya penelitian dan penagihan langsung ke lapangan dan melakukan identifikasi dan klustering BLPN yang akan dilakukan peningkatan pengurusan dalam tahun berjalan.

Rencana aksi kedepan yang akan dilakukan yaitu melalui:

- peningkatan proses tahapan pengurusan piutang Negara termasuk pemberitahuan surat paksa atas 3 BKPN penyerahan 2023;
- clustering BKPN dan memilah yang potensial;
- penggalan potensi piutang ke pemerintah kabupaten ke wilayah kerja KPKNL Kisaran;
- melakukan penelitian lapangan dan penagihan langsung ke debitur

6. (3a-CP) Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan standar barang dan standar kebutuhan

Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) Barang Milik Negara (BMN) merupakan batas tertinggi yang menjadi pedoman bagi Pengguna Barang/Kuasa

Pengguna Barang dalam mengukur tingkat kesesuaian penggunaan BMN sesuai dengan standar. Tingkat Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara. IKU tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN merupakan salah satu tools untuk mendukung kegiatan pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal.

Pengelolaan kekayaan negara dikatakan optimal apabila: a. Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (zero idle) b. Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (cost saving) dan PNB (revenue generating). c. Tingginya turn over penggunaan BMN persediaan (saldo persediaan pada laporan keuangan dalam rentang minimum) d. Adanya manfaat ekonomi (selain cost saving dan revenue), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset.

Capaian IKU tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK tahun 2023 sebesar 73,73% telah melampaui target yang ditentukan yaitu sebesar 68%, sehingga indeks capaian IKU adalah sebesar 108,43%.

Isu strategis dalam IKU ini adalah belum optimalnya penggunaan BMN pada satuan kerja sehingga aset tersebut dapat terindikasi sebagai BMN Idle dan banyak rumah negara yang tidak di huni. Upaya pencapaian target yang telah dilakukan adalah dengan melakukan peninjauan langsung terhadap objek SBSK, melakukan koordinasi dengan satker yang menjadi target SBSK, melaksanakan sosialisasi terkait pengelolaan BMN.

Tabel 3.10
Rincian Target dan Realisasi

Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN Dengan Standar Barang Dan Standar Kebutuhan 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase penurunan outstanding piutang negara	68%	74,67%	109,73%

Data historis target dan realisasi IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN Dengan Standar Barang Dan Standar Kebutuhan pada KPKNL Kisaran tahun 2021 s.d. 2023 disajikan dalam tabel dan diagram berikut ini:

Tabel 3.11
Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN Dengan Standar Barang Dan Standar Kebutuhan 2023
Periode Tahun 2022 s.d. 2023

Uraian	2022	2023
Target	65%	68%
Realisasi	73,43%	74,62%
Persentase Kinerja	112,96%	109,73%

7. (3b-CP) Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan

Pelaksanaan sertipikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah.

Ruang lingkup pengukuran IKU tahun 2023 adalah pelaksanaan pensertipikatan atas bidang tanah BMN yang belum bersertipikat (termasuk yang berstatus Bersertipikat Lainnya), dengan output Sertipikat Hak Pakai (SHP), atau Peta Bidang Tanah (PBT), atau Produk Lainnya, atau update data pada Master Aset SIMAN dan validasi pada fitur Validasi Sertipikasi Tanah (Valserah).

Capaian persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan tahun 2023 adalah 290 dengan target 161, sehingga capaian ini telah melampaui target sebesar 180,12%.

Tabel 3.12
Rincian Target dan Realisasi
Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertipikatkan

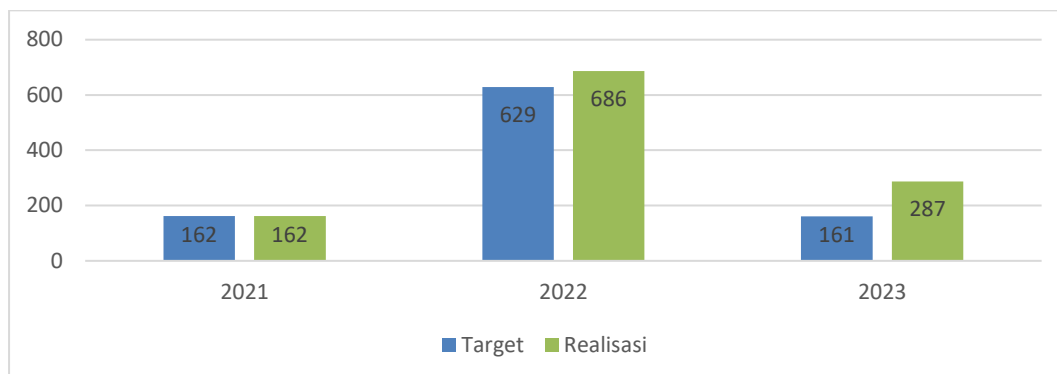
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan	161	287	178,26%

Data historis target dan realisasi IKU persentase tanah BMN yang disertipikatkan pada KPKNL Kisaran tahun 2021 s.d. 2023 disajikan dalam table 3.13.

Tabel 3.13
Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Tanah BMN yang Disertipikatkan
Tahun 2021 s.d. 2023

Uraian	2021	2022	2023
Target	162	629	161
Realisasi	162	686	287
Kinerja (%)	100%	109,06%	178,26%

Gambar 3.5
Perbandingan Target dan Realisasi
Persentase tanah BMN yang disertipikatkan Tahun 2021 s.d. 2023



Isu strategis dan kendala yang dihadapi dalam IKU ini adalah terdapatnya aset tanah BMN yang belum *clear and clean*. Keberhasilan pencapaian target tersebut melalui upaya kunjungan dan koordinasi langsung ke Satuan Kerja dan Kantor Pertanahan dan sosialisasi terkait percepatan Sertifikasi Tanah BMN.

8. (3c-CP) Persentase Efektivitas Penyelesaian BKNP

IKU Persentase Efektivitas Penyelesaian BKNP menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKNP dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN.

Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKNP diukur dengan penjumlahan BKNP Lunas, BKNP Penarikan, BKNP dikembalikan, dan BKNP Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).KPKNL Kisaran menyelesaikan BKNP sebanyak 12 dari 15 yang ditargetkan atau sebesar 125%. Pencapaian tersebut adalah wujud dari optimalisasi pengurusan piutang negara melalui mekanisme pelunasan baik regular maupun crash program, pengembalian BKNP sesuai dengan arahan Direktur Jenderal Kekayaan Negara dan proses tahapan PSBDT.

Tabel 3.14
Rincian Target dan Realisasi
Persentase Efektivitas Penyelesaian BKNP Tahun 2023

Indikator Kerja	Target	Realisasi	%
Persentase efektivitas penyelesaian BKNP	12	15	125,00%

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian target adalah:

- a. optimalisasi pengurusan piutang negara dengan meningkatkan tahap pengurusan piutang negara;

- b. penelitian dan penagihan langsung ke lapangan;
- c. penyelesaian hutang dengan keringanan melalui mekanisme crash program;
- d. peningkatan tahap pengurusan melalui pengurusan piutang sederhana;
- e. edukasi dan komunikasi terhadap penyerah piutang.

Rencana aksi ke depan yang akan dilakukan adalah:

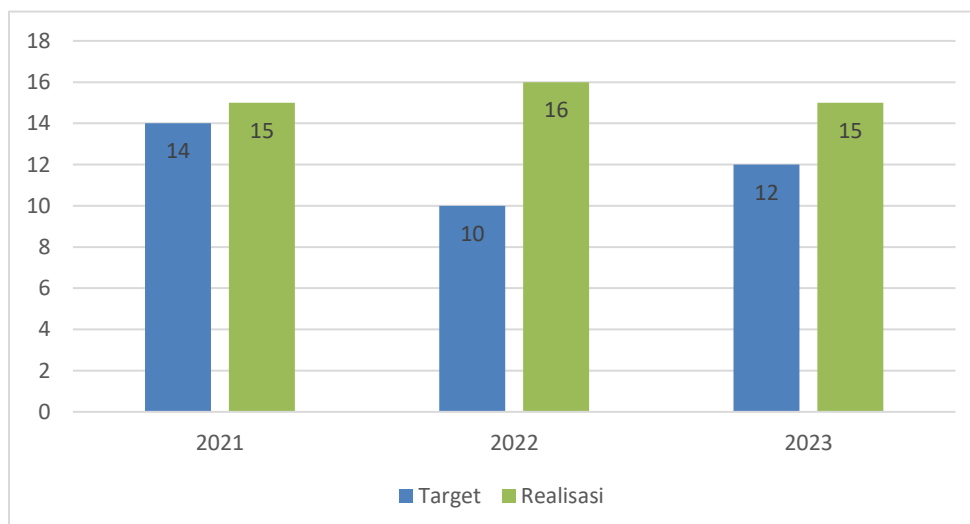
- a. peningkatan proses tahapan pengurusan piutang Negara termasuk pemberitahuan surat paksa atas 3 BKPN penyerahan 2023;
- b. clustering BKPN dan memilah yang potensial;
- c. penggalan potensi piutang ke pemerintah kabupaten ke wilayah kerja KPKNL Kisaran;
- d. melakukan penelitian lapangan dan penagihan langsung ke debitur

Data historis target dan realisasi IKU persentase efektivitas penyelesaian BKPN tahun 2021 s.d. 2023 disajikan dalam table 3.15.

Tabel 3.15.
Perbandingan Target dan Realisasi
Persentase efektivitas penyelesaian BKPN tahun 2021 s.d. 2023

Uraian	2021	2022	2023
Target	14	10	12
Realisasi	15	16	15
Kinerja (%)	107,14%	160,00%	125,00%

Gambar 3.6.
Perbandingan Target dan Realisasi
Persentase efektivitas penyelesaian BKPN tahun 2021 s.d. 2023



9. (4a-CP) Deviasi ketergunaan hasil penilaian

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup hasil penilaian yang diukur adalah hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan dan pemanfaatan yang digunakan dalam Persetujuan. Objek penilaian meliputi Barang Milik Negara (BMN).

Nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan merupakan nilai yang menjadi basis/dasar perhitungan dalam pemberian persetujuan/penolakanpemanfaatan/pemindahtanganan BMN oleh Pengelola Barang.

Jika terdapat persetujuan yang nilainya telah diberikan faktor penyesuaian oleh Pengelola Barang berdasarkan peraturan atau kebijakan dengan dasar nilai penghitungan yang dipakai adalah hasil penilaian maka nilai ketergunaannya adalah 100% dan deviasinya 0%.

Deviasi ketergunaan hasil penilaian dilakukan untuk mengukur selisih antara nilai yang digunakan sebagai dasar dalam persetujuan yang ditetapkan oleh Pengelola Barang dibandingkan dengan nilai hasil penilaian yang disampaikan kepada Pengelola Barang terhadap objek BMN yang sama.

Perhitungan deviasi dilakukan terhadap setiap persetujuan yang objeknya dimintakan penilaian. Capaian deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah rata-rata dari jumlah deviasi dari tiap-tiap persetujuan yang ditetapkan Pengelola Barang yang objeknya dimintakan penilaian.

Capaian IKU deviasi ketergunaan hasil penilaian tahun 2023 adalah 0,00% dari target 25%.

Tabel 3.16
Rincian Target Dan Realisasi
IKU Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Deviasi ketergunaan hasil penilaian	25%	0%	200%

Dalam pelaksanaannya masih dijumpai kendala yaitu satuan kerja menyampaikan nilai usulan yang lebih tinggi dari hasil penilaian yang telah dilakukan Tim Penilai KPKNL. Hal tersebut menimbulkan potensi adanya deviasi antara hasil penilaian dengan nilai persetujuan yang diterbitkan oleh Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara.

10. (5a-CP) Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction

E-auction adalah pelaksanaan lelang oleh KPKNL yang memanfaatkan teknologi,

informasi, dan komunikasi (TIK) berbasis internet. Pemanfaatan TIK berbasis internet ini diharapkan dapat menghasilkan lelang yang lebih optimal dan transparan. Hal ini dikarenakan e-auction dapat menjangkau pesertalebih luas serta peserta tidak diwajibkan hadir di tempat pelaksanaan lelang sehingga dapat meminimalisasi terjadinya pengaturan harga lelang.

Implementasi e-auction meliputi: 1) Pelaksanaan Lelang *e-Auction* adalah lelang tanpa kehadiran peserta lelang, dan 2) *E-Conventional Auction* adalah lelang dengankehadiran peserta lelang yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam pengelolaan infrastruktur pendukung lelang (pembayaran uang jaminan menggunakan Virtual Account)

Implementasi *e-auction* mempunyai beberapa keunggulan antara lain: (i) menghemat waktu, biaya, dan tenaga karena tidak perlu kehadiran di lokasi lelang, (ii) memungkinkan peserta lelang dapat mengikuti lelang dimanapun dan kapanpun, (iii) menghilangkan intimidasi ataupun kerja sama dalam bentuk negatif, (iv) menghasilkan nilai transaksi lelang yang optimal bagi pemohon lelang sekaligus meningkatkan PNBP lelang, dan (v) perbaikan citra layanan lelang di hadapan para pengguna layanan.

Target persentase implementasi *e-auction* terhadap total pelaksanaan lelang tahun 2023 sebesar 94% dari total frekuensi lelang sebanyak 705 dan terealisasi sebesar 100% (seluruh lelang yang dilaksanakan menggunakan mekanisme *e-auction*).

Tabel 3.17
Rincian Target Dan Realisasi
Persentase Pelaksanaan Lelang *E-Auction* Dan *E-Conventional Auction*

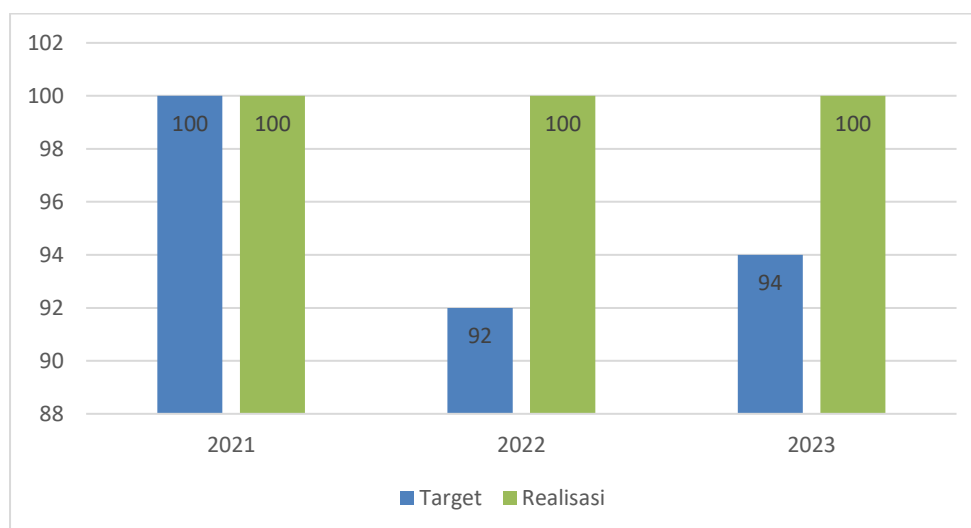
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction Dan E-Conventional Auction	94%	100%	106,38%

Data historis target dan realisasi IKU Realisasi Persentase implementasi *e-auction* pada KPKNL Kisaran tahun 2021 s.d. 2023 disajikan dalam tabel dan diagram berikut ini:

Tabel 3.18
Tabel perbandingan Realisasi Persentase implementasi *e-auction*
Periode Tahun 2021 s.d. 2023

Uraian	2021	2022	2023
Target	100%	92%	94%
Realisasi	100%	100%	100%
Persentase(%)	100%	108,70%	106,38%

Gambar 3.7.
Diagram perbandingan Realisasi Persentase Implementasi *e-auction*
Periode Tahun 2021 s.d. 2023



Isu utama dan implikasi:

- a. Capaian IKU persentase implementasi *e-auction* s.d. Triwulan IV sebesar 100%.
- b. Untuk tahun depan diperlukan upaya-upaya strategis agar IKU ini dapat mencapai target *trajectory* maupun tahunan.

Akar masalah: Adanya potensi resistensi pemohon lelang terhadap *e-auction*

Tindakan yang telah dilakukan: Telah dilaksanakan koordinasi dengan pemohon lelang pada setiap pengajuan permohonan lelang serta edukasi terlakit Lelang.

Rekomendasi rencana aksi:

- a. Koordinasi dengan pemohon lelang
- b. Melaksanakan layanan konsultasi lelang secara intensif
- c. Sosialisasi dan edukasi kepada pemohon lelang maupun kepada masyarakat mengenai keuntungan mekanisme *e-auction*
- d. Publikasi lelang yang lebih maksimal untuk memasyarakatkan lelang DJKN sebagai salah satu alternatif jual beli yang transparan, komersil dan menguntungkan

11. (5b-CP) Persentase pelaksanaan permohonan lelang online

Modul Permohonan Online adalah suatu modul yang digunakan oleh stakeholder / Pemohon Lelang untuk dapat menyampaikan permohonan layanan lelang secara online. Melalui modul ini pemohon lelang mengajukan permohonan lelangnya secara online melalui jaringan internet dengan melampirkan scan dokumen persyaratan lelang. Pemohon menginput data-data terkait lelangnya ke dalam database melalui aplikasi ini. Dengan terimplementasikannya permohonan lelang online, maka penginputan data lelang sebagai salah satu materi dalam info lelang, pencetakan

laporan lelang maupun risalah lelang di KPKNL dapat dilakukan lebih cepat dan secara otomatis oleh sistem aplikasi. Pelaksanaan implementasi permohonan lelang online dapat dilakukan untuk jenis lelang Noneksekusi Suakarela, Noneksekusi Wajib dan Eksekusi yang telah terimplementasi di lelang.go.id.

Tabel 3.19.
Rincian Target dan Realisasi
Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online KPKNL Kisaran Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase Pelaksanaan Permohonan Lelang Online	86%	100%	116,28%

Langkah upaya yang dilakukan dalam pencapaian IKU ini adalah dengan melakukan sosialisasi dan edukasi terkait Lelang online serta melakukan asistensi terhadap satuan kerja/stakeholder untuk mengajukan permohonan Lelang online.

12. (5c-CP) Persentase evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)

IKU Evaluasi kinerja BMN merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN diharapkan mampu memperbaiki struktur portofolio aset negara.

Melalui evaluasi kinerja BMN, diharapkan dapat mewujudkan struktur portofolio aset negara yang mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada publik melalui rekomendasi skema pengelolaan aset yang lebih baik bagi Pengguna dan Pengelola Barang.

Tabel 3.20
Perbandingan Target Dan Realisasi Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	30	37	123,33%

Capaian Evaluasi kinerja BMN tahun 2023 adalah 37 dari target sebanyak 30 atau secara persentase capaian adalah sebesar 123,33%.

Evaluasi secara periodik terhadap portofolio BMN perlu dilakukan dengan tujuan untuk mengukur performa/kinerja BMN, untuk selanjutnya dibuat langkah-langkah strategis dalam rangka efisiensi, efektifitas, dan optimalisasi pengelolaan BMN.

Dalam pelaksanaannya masih dijumpai kendala yaitu satuan kerja belum menyajikan data yang benar dan tepat untuk disajikan dalam laporan Monev BMN serta tidak semua

data dukung tersedia di www.bps.go.id, sehingga dilakukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti hal tersebut serta upaya pencapaian target melalui:

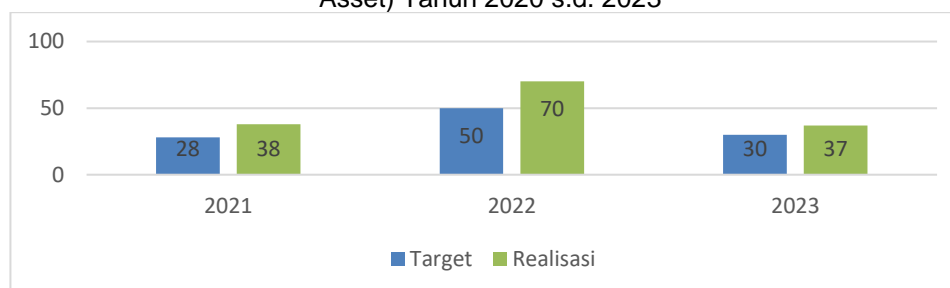
- Melaksanakan koordinasi intensif dengan Satuan Kerja;
- Asistensi kepada satuan kerja
- Melakukan peninjauan langsung terhadap objek portofolio aset
- Data dukung dihitung secara manual

Data historis target dan realisasi IKU persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) pada KPKNL Kisaran tahun 2021 s.d. 2023 disajikan dalam tabel 3.17.

Tabel 3.21.
Perbandingan Target Dan Realisasi Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Asset) Tahun 2021 s.d. 2023

Uraian	2021	2022	2023
Target	28	50	30
Realisasi	38	70	37
Kinerja (%)	135,71%	140,00%	122,33%

Gambar 3.8.
Perbandingan Target Dan Realisasi Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN(Portofolio Asset) Tahun 2020 s.d. 2023



(6a-CP) Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara

Tindak lanjut pengelolaan aset dilakukan dalam rangka menjamin terselenggaranya pengelolaan BMN yang baik. Untuk Pengelola Barang, tindak lanjut ini dilakukan meliputi kegiatan pemantauan dan investigasi terhadap pelaksanaan penggunaan BMN, pemanfaatan BMN, dan pemindahtanganan BMN.

Target yang ditetapkan IKU yaitu 86% dan realisasi yang berhasil dicapai 97,14% dengan persentase capaian kinerja adalah sebesar 112,96%.

Tabel 3.22.
Tabel Perbandingan Target dan Realisasi
Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase tindak lanjut Persetujuan pengelolaan barang milik negara	86%	97,14%	112,96%

Data historis target dan realisasi IKU Realisasi Persentase Tindak Lanjut Pengelolaan Kekayaan Negara pada KPKNL Kisaran tahun 2021 s.d. 2023 disajikan dalam tabel dan diagram berikut ini:

Tabel 3.23.
Tabel Perbandingan Realisasi Persentase Tindak Lanjut Pengelolaan Kekayaan Negara Periode Tahun 2021 s.d. 2023

Uraian	2021	2022	2020
Target	85	85	86
Realisasi	100	96,55	97,14
Persentase(%)	117,65%	113,59%	112,96%

Isu utama dan implikasi:

- Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan BMN pada K/L, dilakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN yang meliputi kegiatan pemantauan atas pengelolaan BMN pada K/L terutama terkait aspek utilisasi-nya.
- Difokuskan pada pemantauan utilisasi berupa pemanfaatan dan pemindahtanganan. Objek yang dipantau adalah tindak lanjut atas surat persetujuan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang telah diterbitkan oleh DJKN selaku pengelola barang.
- Capaian IKU persentase tindak lanjut pengelolaan kekayaan negara s.d. Triwulan IV sebesar 112,96% dalam artian telah ditindaklanjuti keseluruhan.
- Capaian atas IKU persentase tindak lanjut pengelolaan asset telah melebihi target *trajectory* (tahunan).

Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam upaya pencapaian target adalah:

- Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap persetujuan yang diterbitkan Pengelola Barang
- Melaksanakan sosialisasi dan edukasi terkait pengelolaan BMN kepada satuan kerja.

Dalam rangka menghadapi target tahun 2024 dan meningkatkan kualitas kepatuhan satuan kerja dalam pengelolaan aset perlu adanya rencana yang matang, peningkatan koordinasi dengan kantor pelayanan, dan bidang-bidang terkait.

Rekomendasi rencana aksi:

- Menyampaikan Permintaan dan Penyampaian Laporan Wasdal
- Melakukan koordinasi ke satker secara berkesinambungan sejak awal tahun 2024 antara lain sewaktu satker berkonsultasi terkait pengelolaan asetnya.
- Melakukan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMN Kewenangan KPKNL.

13. (7a-N) Persentase pengembangan kompetensi pegawai

Pengembangan kompetensi bagi pegawai di lingkungan DJKN merupakan upaya pengembangan, pengetahuan, keterampilan, dan/atau sikap perilaku pegawai dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Pengukuran dilakukan dengan pemenuhan standar kompetensi teknis (kesesuaian antara penempatan/posisi pegawai saat ini dengan kompetensi/pelatihan pegawai yang dimiliki) serta memperhitungkan pemenuhan standar jamlat kegiatan program pengembangan kompetensi (Teknis/Manajerial) yang diikuti pegawai selama tahun 2023.

Persentase pengembangan kompetensi pegawai ini mengukur persentase banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan perencanaan pengembangannya. Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 30 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan, dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi.

Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Keuangan. Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada modul DKI. Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan training dengan berdasar kesepakatan pegawai dengan atasannya.

Pada tahun 2023, di lingkungan KPKNL Kisaran persentase pengembangan kompetensi pegawai mencapai 120% dari target kinerja 100% atau dengan capaian 120%.

Tabel 3.24.
Tabel Perbandingan Target dan Realisasi
Persentase pengembangan kompetensi pegawai tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	120%	120%

Meskipun telah mencapai target kinerja, namun masih terdapat area-area yang perlu mendapatkan perhatian khususnya dalam menghadapi tantangan target di tahun 2024, antara lain :

- Pegawai tidak dapat/berhalangan mengikuti diklat yang sudah ditetapkan/dijetujui;
- Diklat yang diikuti tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab/*hard competency* di bidangnya;
- Pembatalan beberapa diklat karena adanya penghematan anggaran.

Atas hal-hal tersebut telah disusun langkah antisipasi guna menghindari kendala:

- Mengusulkan peserta diklat sesuai dengan *hard competency* masing-masing diseksi terkait;
- Memberikan pemahaman secara tertulis kepada setiap pegawai agar dapat memilih diklat yang akan diikuti sesuai *hard competency* di bidangnya;
- Rotasi internal pelaksana;

Data historis target dan realisasi IKU Realisasi Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai pada KPKNL Kisaran tahun 2021 s.d. 2023 disajikan dalam tabel dan diagram berikut ini:

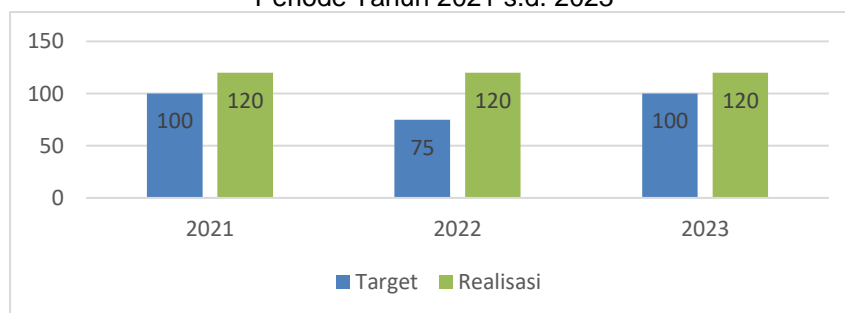
Tabel 3.25.

Tabel Perbandingan Target Dan Realisasi Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai Tahun 2021 s.d. 2023

Uraian	2021	2022	2023
Target	100	75	100
Realisasi	120	120	120
Persentase (%)	120	160	120

Gambar 3.9.

Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai Periode Tahun 2021 s.d. 2023



14. (8a-CP) Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKKPA) meliputi perhitungan terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup Nilai evaluasi kinerja anggaran kementerian negara/lembaga (SMART DJA) dan Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran kementerian negara/Lembaga (IKPA DJPB) yang ada pada unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan regulasi nasional sebagaimana dalam ketentuan SE-8/MK.1/2020.

Aspek tata kelola dan administratif terdiri atas Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan (UP), Data Kontrak, Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), Retur Surat Perintah Pencairan Dana

(SP2D), Perencanaan Kas (Renkas), Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Pagu Minus, dan Dispensasi.

Tabel 3.26.
Rincian Target Dan Realisasi
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100%	101,44%	101,44%

Pada tahun 2023, KPKNL Kisaran mengelola anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.27.
Rincian Jenis Belanja dan Anggaran Tahun 2023

Keterangan	Jenis Belanja			Total
	Pegawai	Barang	Modal	
Pagu	Rp -	Rp 1.906.674.000	Rp -	Rp 1.710.010.000
Realisasi	Rp -	Rp 1.777.583.676	Rp -	Rp 1.580.702.154
Persentase	0,00%	93,23%	0,00%	92,44%
Sisa	Rp -	Rp 129.090.324	Rp -	Rp 129.090.324

Dengan pengelolaan dana tersebut, KPKNL Kisaran mampu mencapai output dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.28.
Rincian Target dan Realisasi Capaian Output Tahun 2023

Kode	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen	Target	Realisasi
CD.4796.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	50	
CD.4796.AEF.001	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	25	80
CD.4796.AEF.002	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang	25	50
CD.4798.AAH	Peraturan lainnya	427	
CD.4798.AAH.001	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	50	100
CD.4798.AAH.002	Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	8	13
CD.4798.AAH.003	Risalah Lelang	350	713
CD.4798.AAH.301	Risalah Lelang Sukarela UMKM (PU)	20	68
CD.4798.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	811	
CD.4798.FAE.002	Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	30	111
CD.4798.FAE.003	Rekomendasi Hasil Kajian Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	171	513
CD.4798.FAE.004	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	1	3
CD.4798.FAE.005	Rekomendasi Hasil Penilaian	1	3
CD.4798.FAE.007	Penggalian Potensi Lelang	1	62
CD.4798.FAE.301	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PU)	161	486
CD.4798.FAK	Pengelolaan Aset BUN	1	

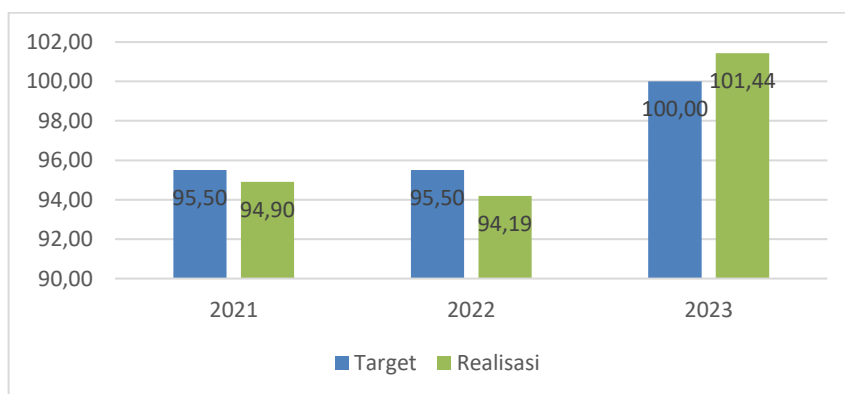
CD.4798.FAK.001	Aset BUN yang Dikelola	2	2
WA.4700.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	20	
WA.4700.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	20	44,4
WA.4701.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1	
WA.4701.CAN.001	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	1	1
WA.4701.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	24	
WA.4701.EBA.002	Kerumahtanggaan	12	12
WA.4701.EBA.994	Layanan Perkantoran	12	12
WA.4701.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	10	
WA.4701.EBB.001	Peralatan Fasilitas Perkantoran	10	10
WA.4702.BMB	Komunikasi Publik	1	
WA.4702.BMB.002	Kehumasan	5	30
WA.4704.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	5	
WA.4704.EBA.001	Rekomendasi Kepatuhan Internal	5	9

Berdasarkan data realisasi penyerapan anggaran yang merujuk pada hasil monitoring dan evaluasi setelah dilakukan revisi terhadap anggaran per jenis belanja pada KPKNL Kisaran tahun 2023, data historis target dan realisasi IKU Realisasi Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada KPKNL Kisaran tahun 20121 s.d. 2023 disajikan dalam tabel dan diagram berikut ini:

Tabel 3.29.
Tabel Perbandingan Realisasi Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Periode Tahun 2021 s.d. 2023

Uraian	2021	2022	2023
Target	95,5%	95,5%	100%
Realisasi	94,90%	94,19%	101,44%
Persentase (%)	99,37%	98,63%	101,44%

Gambar 3.10.
Diagram Perbandingan Realisasi realisasi penyerapan DIPA Tahun 2021 s.d. 2023



Data historis menunjukkan bahwa pada periode 2021 dan 2022 IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun akar masalah yang dihadapi dalam pencapaian IKU tersebut diantaranya:

- a. Adanya penyimpangan antara Rencana Penarikan Dana yang telah disusun dengan realisasi anggaran. Hal ini terjadi karena memprioritaskan indikator penyerapan anggaran.
- b. Rendahnya pengelolaan UP dan TUP karena banyaknya kegiatan yang dapat dilakukan melalui pembayaran langsung (SPM LS)

Pada tahun 2023, KPKNL Kisaran berupaya maksimal untuk mencapai target tahun 2023 melalui langkah-langkah diantaranya:

- a. Membuat Nota Dinas permintaan rencana kegiatan kepada Seksi dan Jabatan Fungsional terkait serta rencana penyerapan anggaran tiap bulannya.
- b. Menyusun RPD secara matang dengan menyesuaikan target penyerapan anggaran serta berkomitmen mematuhi RPD yang telah disusun
- c. Memperhitungkan penggunaan UP agar memenuhi target yang telah ditentukan tiap bulannya.
- d. Menyampaikan SPM GUP tepat waktu dan sesuai proporsinya.
- e. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan

15. (8b-CP) Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

PNBP Fungsional DJKN merupakan Jenis PNBP DJKN yang tercantum pada DIPA BA 015 DJKN yang terdiri dari PNBP yang berasal dari Biad Pengurusan Piutang Negara dengan MAP: 425785 dan Bea Lelang dengan MAP 425782, 425784 (PL I dan Pegadaian).

Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN, diukur dari:

- a. Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425785 pada aplikasi Focus PN dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap pelaksanaan rekonsiliasi
- b. Selisih antara pembukuan PNBP MAP 425785 pada aplikasi FocusPN dengan PNBP pada aplikasi OM SPAN/KPPN pada periode setiap

Target Deviasi PNBP dari Bea Lelang adalah 15% Target Deviasi PNBP dari Biad PPN adalah 15%, sehingga rata-rata target 15%

Tabel 3.30.
Tabel Perbandingan Target dan Realisasi
Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Deviasi data PNBP fungsional DJKN	15%	0,00%	200%

Capaian IKU sdeviasi data PNBP fungsional DJKN tahun 2023 adalah 0,00% dari

target 15%. Dalam pelaksanaannya masih dijumpai kendala yaitu perbedaan data antara pembukuan pada aplikasi dropbox lelang dengan aplikasi OM SPAN. Hal tersebut menimbulkan potensi adanya deviasi data PNBPN fungsional DJKN yang berdampak pada tingkat akurasi penyajian data PNBPN DJKN.

16. (8c-N) Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan di tahun 2023 berfokus pada dukungan pencapaian atas Indeks Pengelolaan Aset (IPA) yang diukur oleh DJKN dan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) yang diukur oleh LKPP. IKU diukur dari 2 komponen yakni persentase dukungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) dan persentase dukungan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP).

Tabel 3.31.
Rincian Target Dan Realisasi
Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan Anggaran Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan Anggaran	100%	120%	120%

KPKNL Kisaran telah melakukan upaya dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan pengelolaan BMN dan Pengadaan hal ini dilihat dari pencapaian target IKU tersebut dengan dukungan penguatan fungsi pengelolaan keuangan dan BMN dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi di lingkungan KPKNL Kisaran.

17. (9a-CP) Indeks pengawasan dan pengendalian yang efektif

Pengendalian dan pengawasan dapat dikatakan efektif apabila pengawasan dan pengendalian yang dilakukan mampu mendukung tercapainya tujuan organisasi. Kegiatan penilaian efektivitas UKI memiliki 11 (sebelas) unsur penilaian, yakni:

- a. Dukungan SDM, Akses Data & Informasi, serta Komunikasi
- b. Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE).
- c. Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA).
- d. Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku (PPKEKP)
- e. Penyusunan dan Pemanfaatan Fraud Risk Scenario (FRS)
- f. Penyusunan Profil Pegawai, 7. Penyusunan Simpulan dan LPPI
- g. Jumlah Pengaduan Masyarakat
- h. Jumlah Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APIP/IBI

- i. Kepuasan Stakeholders, dan
- j. Hasil Survei Penilaian Integritas.

Tabel 3.32.
Rincian Target Dan Realisasi
Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan Anggaran Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan Anggaran	60	97	161,67%

18. (9b-CP) Indeks pengelolaan kinerja dan kualitas manajemen risiko

Dalam rangka memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi, sebagaimana telah diterbitkan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan, memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi

maupun kepada setiap pegawai.

Review Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi serta efektivitas edukasi pengelolaan kinerja. Sedangkan review atas kualitas manajemen risiko dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan identifikasi, pemantauan, dan mitigasi risiko serta didukung dengan edukasi manajemen risiko yang efektif dan ketersediaan anggaran pelaksanaan mitigasi atas risiko.

Tabel 3.33.
Rincian Target Dan Realisasi
Indeks Pengelolaan Kinerja Dan Kualitas Manajemen Risiko Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan Anggaran	80	99,67	124,59%

19. (9c-CP) Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021

tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Terbitnya PermenPAN-RB 90/2021 yang dirilis pada Bulan Januari tahun 2022, mengakibatkan perubahan mendasar pada evaluasi Zona Integritas di Kementerian Keuangan. Merujuk pada Lampiran PermenPAN-RB 90/2021, bahwa bagi instansi pemerintah yang satkernya telah lebih dari 30% mendapatkan predikat Menuju WBK/WBBM, maka tidak perlu mengajukan ZI-WBK/WBBM ke level nasional. Dengan demikian, berdasarkan data Kementerian Keuangan yang unit kerjanya sudah lebih dari 30% mendapat predikat ZI WBK/WBBM diakhir 2021, maka Kementerian Keuangan mulai tahun 2022 melaksanakan evaluasi mandiri dalam rangka penetapan unit kerja yang mendapatkan predikat ZI WBK/WBBM.

Tabel 3.34.

Rincian Target Dan Realisasi

Nilai Pemenuhan Unit Kerja Terhadap Kriteria ZI Menuju WBK Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja
Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK	100	90	90%

Adapun keterangan dari capaian realisasi nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK adalah sebagai berikut.

- Tidak lolos penilaian level TPE1 karena alasan fraud dan/atau pelanggaran integritas (60)
- Tidak lolos penilaian level TPE1 karena alasan non fraud (70)
- Tidak lolos penilaian level TPK dan/atau tidak memperoleh predikat ZI WBK/WBBM karena alasan fraud dan/atau pelanggaran integritas (80)
- Tidak lolos penilaian level TPK dan/atau tidak memperoleh predikat ZI-WBK/WBBM karena alasan non fraud (90)
- Lolos penilaian level TPK dan berpredikat ZI-WBK/WBBM (100).

Tahun 2023, KPKNL Kisaran tidak mencapai target IKU Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI menuju WBK Tahun 2023 dengan nilai realisasi sebesar 90, yang dinyatakan tidak lolos penilaian level TPK dan/atau tidak memperoleh predikat ZI-WBK/WBBM karena terdapat catatan dari pihak eksternal dan belum diketahui secara pasti catatan dimaksud.

Adapun dalam pelaksanaan Kegiatan pembangunan zona integritas menuju WBK pada KPKNL Kisaran sudah berupaya semaksimal mungkin dalam memenuhi kriteria Penilaian, diantaranya:

- Menyusun dan melaksanakan rencana kerja Pembangunan ZI menuju WBK

- b. Memenuhi dokumen komponen pengungkit dan komponen hasil
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala
- d. Membangun budaya kerja dan pola pikir yang positif dengan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

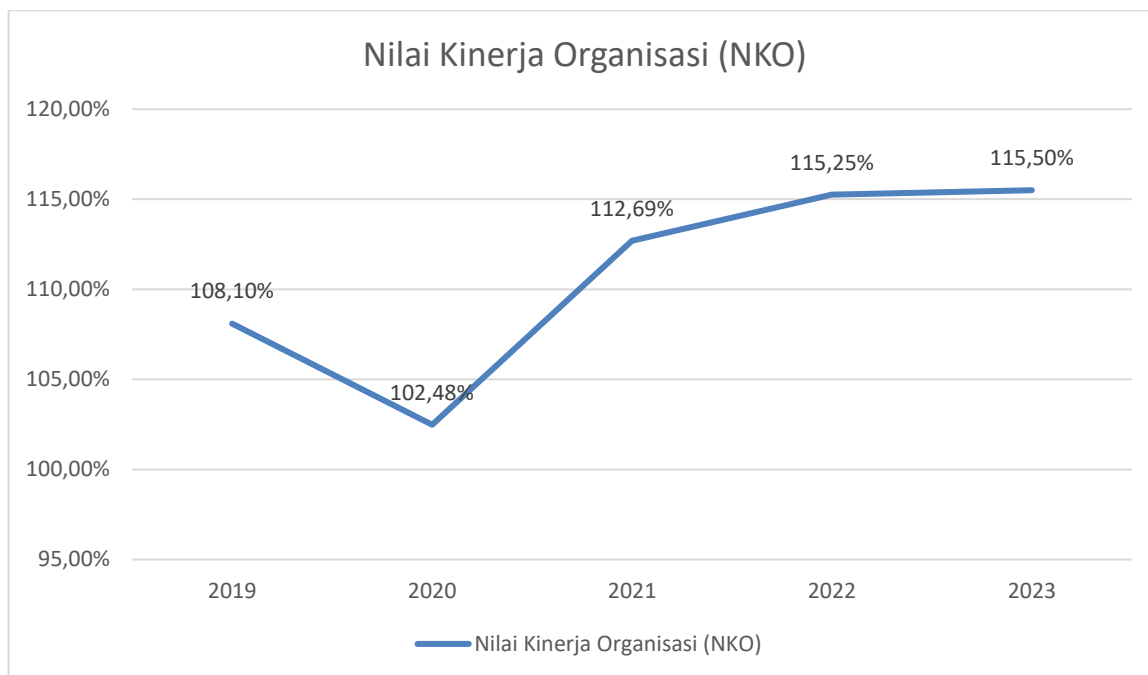
Rencana aksi kedepan dalam upaya pencapaian target pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK yaitu:

- a. Seluruh jajaran pegawai KPKNL Kisaran berkomitmen untuk membangun zona integritas menuju WBK,
- b. Meningkatkan kinerja dan memberikan layanan kepada seluruh stakeholder dengan melakukan perbaikan secara terus menerus dan motto layanan CINTA (Cepat, Inovatif, Normatif, Transparan dan Adaptif).
- c. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja Pembangunan ZI menuju WBK
- d. Memenuhi dokumen komponen pengungkit dan komponen hasil
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala

BAB IV PENUTUP

Secara keseluruhan capaian kinerja atas 9 Sasaran Strategis yang dijabarkan dalam 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Kemenkeu *Three* KPKNL Kisaran Tahun 2021 dapat tercapai dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 115,50%.

Gambar 4.1
Grafik Perbandingan NKO KPKNL Kisaran Tahun 2019 s.d. 2023



Grafik pada gambar 4.1 mengilustrasikan perkembangan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Kisaran dalam kurun tahun 2018 s.d. 2023. Selama kurun waktu 2020 s.d. 2023, NKO KPKNL Kisaran mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Selain itu, dari sisi target yang dibebankan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya dan dari sisi sifat target juga lebih *challenging*. Dalam hal ini, KPKNL Kisaran selain selalu berupaya meningkatkan kinerja organisasi tidak hanya dari sisi kuantitas, namun juga upaya mewujudkan peningkatan kinerja organisasi dari sisi kualitas pekerjaan dalam rangka mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Dalam upaya pencapaian target kinerja pada tahun 2023, KPKNL Kisaran menghadapi permasalahan dan kendala/hambatan. Namun, kendala dan permasalahan tersebut masih dapat diatasi dengan dilakukannya penanganan segera terhadap permasalahan yang ada, sehingga target yang telah ditetapkan secara umum dapat dicapai.

Sebagai unit vertikal DJKN, KPKNL Kisaran selalu berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dengan menghadapi permasalahan dan kendala/hambatan. Dalam rangka menghadapi tantangan, hambatan dan permasalahan guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2023, masing-masing seksi/subbagian umum telah menyusun *mapping* dan *action plan*.

Seluruh informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja KPKNL Kisaran tahun 2023 merupakan wujud pertanggungjawaban keberhasilan kinerja KPKNL Kisaran atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah diberikan kepada KPKNL Kisaran selama tahun 2023.

Laporan Kinerja KPKNL Kisaran tahun 2023 diharapkan mampu menjadi bahan refleksi, koreksi, evaluasi sekaligus motivasi untuk memperbaiki area tugas fungsi yang belum optimal serta peningkatan area tugas fungsi yang selama ini telah baik dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja KPKNL Kisaran di periode yang akan datang, sehingga peran dan keberadaan KPKNL Kisaran dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui penyediaan layanan berdasarkan nilai-nilai Kementerian Keuangan.

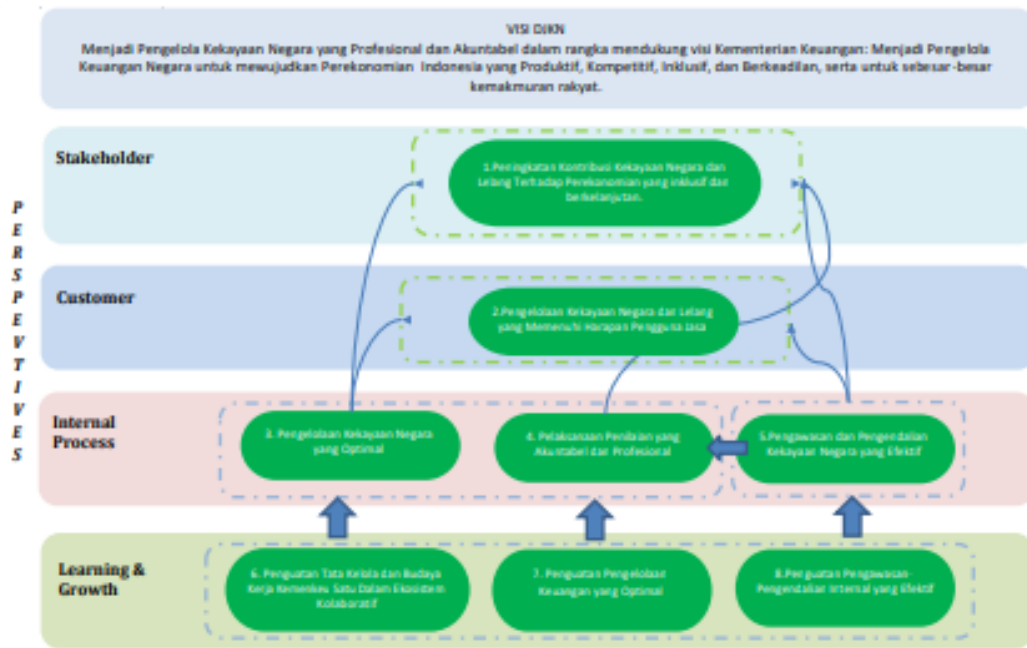
Lampiran

Kontrak Kinerja,
Addendum Kontrak Kinerja
dan Pengukuran Kinerja
KPKNL Kisaran 2023



**PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-03 /WKN.02/2023
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG KISARAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023**

Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
KISARAN
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%
		1b-CP	Persentase produktivitas lelang	80%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%
		2b-CP	Persentase penurunan <i>outstanding</i> piutang negara	100%
		2c-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	94%
		2d-CP	Persentase pelaksanaan permohonan lelang online	86%
3.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	3a-CP	Tingkat tindak lanjut persetujuan pengelolaan barang milik negara	86%
		3b-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan standar barang dan standar kebutuhan	68%
		3c-CP	Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100%
		3d-CP	Persentase barang milik negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		3e-CP	Persentase penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
4.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	4a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	25%
5.	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif	5a-CP	Deviasi Data PNBPN fungsional DJKN	15%
6.	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif	6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
7.	Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal	7a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100
8.	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif	8a-CP	Indeks integritas	88,67
		8b-CP	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	100
		8c-CP	Indeks pengelolaan kinerja dan kualitas manajemen risiko	80
		8d-CP	Indeks pengawasan dan pengendalian yang efektif	60
		8e-N	Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK	100%



Program/ Kegiatan Tahun 2023	Anggaran
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp 2.407.000
2. Pengelolaan Aset	Rp 244.790.000
3. Legislasi dan Litigasi	Rp 12.053.000
4. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 1.629.054.000
5. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp 7.634.000
6. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp 10.736.000

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan
Negara Sumatera Utara



Ditandatangani Secara Elektronik
Tedy Syandriadi

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Kisaran



Ditandatangani Secara Elektronik
Agus Budianta



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
KISARAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan							
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
1b-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	45%	45%	60%	60%	80%	80%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
2a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
2b-CP	Persentase penurunan <i>outstanding</i> piutang negara	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
2c-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%
2d-CP	Persentase pelaksanaan permohonan lelang online	20%	40%	40%	63%	63%	86%	86%
3	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							
3a-CP	Tingkat tindak lanjut persetujuan pengelolaan barang milik negara	-	50%	50%	-	50%	86%	86%
3b-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan standar barang dan standar kebutuhan	-	50%	50%	55%	55%	68%	68%
3c-CP	Evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	12%	32%	32%	75%	75%	100%	100%
3d-CP	Persentase barang milik negara berupa tanah yang disertipatkan	-	40%	40%	60%	60%	100%	100%
3e-CP	Persentase penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
4	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
4a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
5	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif							



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
5a-CP	Deviasi data PNBPF fungsional DJKN	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
6	Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu Dalam Ekosistem Kolaboratif							
6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
7	Penguatan Pengelolaan Keuangan yang Optimal							
7a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
8	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif							
8a-CP	Indeks integritas	-	-	-	-	-	88,67	88,67
8b-CP	Indeks maturitas penyelenggaraan SPIP	-	-	-	-	-	100	100
8c-CP	Indeks pengelolaan kinerja dan kualitas manajemen risiko	-	-	-	-	-	80	80
8d-CP	Indeks pengawasan dan pengendalian yang efektif	-	-	-	-	-	60	60
8e-N	Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK	-	-	-	-	-	100%	100%

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
Dan Lelang Kisanan,



Utandatanganinya Secara Elektronik
Agus Budiarta



**INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KISARAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023**

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Anggaran
				Kegiatan	Output			
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian/ Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Kompetisi Inovasi Manajer Aset (KOIN MAS) DJKN	Jumlah aset yang diberdayakan dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat	Q1: Inventarisasi terhadap aset yang akan diberdayakan/dimanfaatkan	Daftar Aset yang akan diberdayakan/dimanfaatkan	Q1 s.d. Q4	Seksi PKN	-
				Q2: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q2: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q3: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q3: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q4: Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Q4: Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan			

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kisaran



Mandragani Secara Elektronik
Agus Budianta



PENGHARGAAN YANG DITERIMA KPKNL KISARAN PADA TAHUN 2023



**JUARA HARAPAN
PERTAMA KEDAI
LELANG UMKM
TAHUN 2023**



**PEJABAT
FUNGSIONAL
PELELANG AHLI
PERTAMA TERBAIK
TAHUN 2023 PADA
ZONA IV**



**PEJABAT
FUNGSIONAL
PELELANG AHLI
PERTAMA TERBAIK
UNTUK WILAYAH
KERJA KANWIL DJKN
SUMATERA UTARA**

PENGHARGAAN YANG DITERIMA KPKNL KISARAN PADA TAHUN 2023

Penghargaan dari Wakil Ketua DPRK
Penghargaan Optimalisasi dari Wakil Gubernur Sumatera

No.	Nama Penerima	Nama KPKNL	Jenis Penghargaan	Referensi
1.	Kantor Balai DJKA Sumatera Utara	KPKNL Medan	Penghargaan sebagai Juara 1 dan Juara 2 dalam Lomba Karya Tulis dan Laporan Tahunan 2022/2023	Keputusan Kepala Balai DJKA Sumatera Utara
2.	Kantor Balai DJKA Sumatera Utara	KPKNL Medan	Penghargaan sebagai Juara 1 dan Juara 2 dalam Lomba Karya Tulis dan Laporan Tahunan 2022/2023	Keputusan Kepala Balai DJKA Sumatera Utara
3.	Kantor Balai DJKA Sumatera Utara	KPKNL Medan	Penghargaan sebagai Juara 1 dan Juara 2 dalam Lomba Karya Tulis dan Laporan Tahunan 2022/2023	Keputusan Kepala Balai DJKA Sumatera Utara
4.	Kantor Balai DJKA Sumatera Utara	KPKNL Medan	Penghargaan sebagai Juara 1 dan Juara 2 dalam Lomba Karya Tulis dan Laporan Tahunan 2022/2023	Keputusan Kepala Balai DJKA Sumatera Utara
5.	Kantor Balai DJKA Sumatera Utara	KPKNL Medan	Penghargaan sebagai Juara 1 dan Juara 2 dalam Lomba Karya Tulis dan Laporan Tahunan 2022/2023	Keputusan Kepala Balai DJKA Sumatera Utara
6.	Kantor Balai DJKA Sumatera Utara	KPKNL Medan	Penghargaan sebagai Juara 1 dan Juara 2 dalam Lomba Karya Tulis dan Laporan Tahunan 2022/2023	Keputusan Kepala Balai DJKA Sumatera Utara
7.	Kantor Balai DJKA Sumatera Utara	KPKNL Medan	Penghargaan sebagai Juara 1 dan Juara 2 dalam Lomba Karya Tulis dan Laporan Tahunan 2022/2023	Keputusan Kepala Balai DJKA Sumatera Utara
8.	Kantor Balai DJKA Sumatera Utara	KPKNL Medan	Penghargaan sebagai Juara 1 dan Juara 2 dalam Lomba Karya Tulis dan Laporan Tahunan 2022/2023	Keputusan Kepala Balai DJKA Sumatera Utara
9.	Kantor Balai DJKA Sumatera Utara	KPKNL Medan	Penghargaan sebagai Juara 1 dan Juara 2 dalam Lomba Karya Tulis dan Laporan Tahunan 2022/2023	Keputusan Kepala Balai DJKA Sumatera Utara
10.	Kantor Balai DJKA Sumatera Utara	KPKNL Medan	Penghargaan sebagai Juara 1 dan Juara 2 dalam Lomba Karya Tulis dan Laporan Tahunan 2022/2023	Keputusan Kepala Balai DJKA Sumatera Utara

10 BESAR KOIN MAS TAHUN 2023/2024



Penghargaan di BTP Kelas I Medan



PENGHARGAAN DARI BTP KELAS I MEDAN



KPKNL Terkoordinatif dan Tercepat dalam Penyelesaian Sertifikasi BMN

PENGHARGAAN DARI DJKA TERKAIT KPKNL TERKOORDINATIF DAN TERCEPAT DALAM PENYELESAIAN SERTIFIKASI BMN



PENGHARGAAN DARI KPPN TJ BALAI SEBAGAI PERINGKAT TIGA KINERJA SATKER MITRA KPPN TJ BALAI IMPLEMENTASI SISTEM DIGITAL PAYMENT-MARKETPLACE PERIODE SEMESTER II TA 2022



Area Layanan Terpadu (APT) KPKNL Kisaran



Area Terbuka Depan Kantor

Wajah Baru KPKNL KISARAN

Untuk meningkatkan kualitas layanan , pada tahun 2023, KPKNL Kisaran melakukan beberapa penambahan fasilitas serta perbaikan dan pemeliharaan terhadap area-area pada Kantor KPKNL Kisaran, beberapa perubahan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

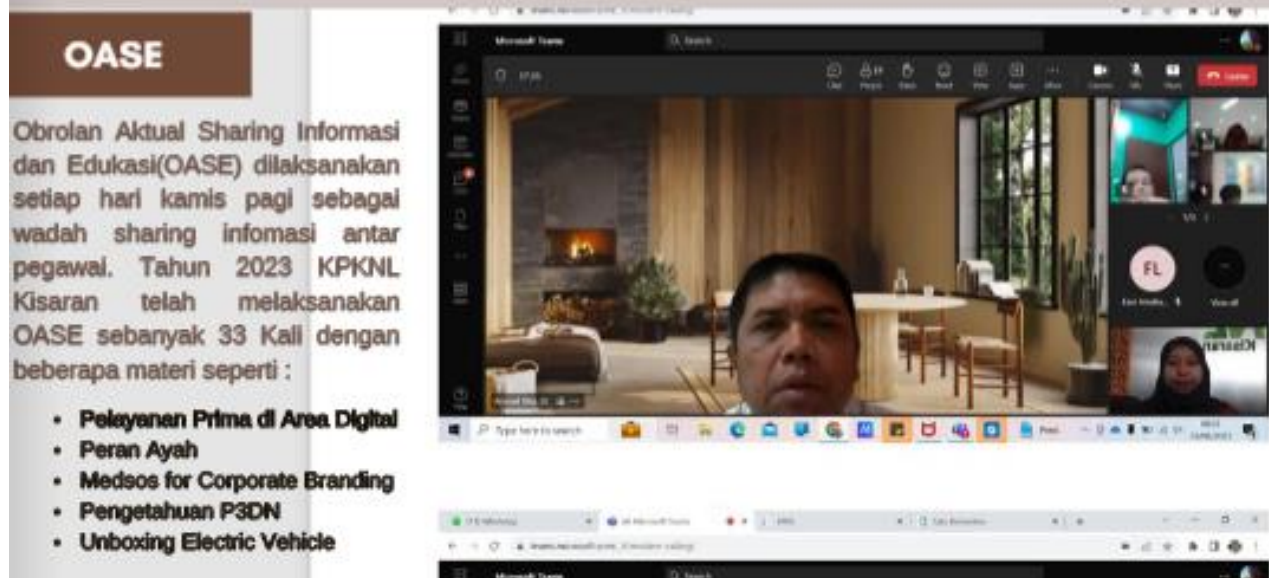


Rumah UMKM & Pusat Oleh-Oleh Asahan dan Angkringan bang Djaken



Revitalisasi Area Olahraga : Lapangan Badminton, Ring Basket dan Tenis Meja

HABITUASI BUDAYA DI LINGKUNGAN KPKNL KISARAN



HABITUASI BUDAYA DI LINGKUNGAN KPKNL KISARAN



Sharing is Caring (SISCA) diadakan setiap triwulanan sebagai wadah kritik saran terhadap apapun yang berkaitan dengan kantor



Expert Sharing Session and Talk (EXIST) diadakan triwulanan sebagai wadah penyediaan informasi oleh Pakar sesuai bidangnya



Dilakukan rutin dengan memanfaatkan fasilitas kantor seperti lapangan badminton, meja tenis, ring basket dan lain-lain sebagai sarana peningkatan kebugaran serta memperkuat solidaritas pegawai.

PEMANFAATAN BMN KPKNL KISARAN TAHUN 2023

PERPANJANGAN SEWA CAFE K&L

Cafe K&L melakukan perpanjangan pemanfaatan BMN berupa Sewa tanah pada area KPKNL Kisaran



ANGKRINGAN BANG DJAKEN

Pada tahun 2023 KPKNL Kisaran bersama melakukan pemanfaatan BMN berupa sewa oleh UMKM "Angkringan Bang Djaken"

PERESMIAN RUMAH UMKM & PUSAT OLEH-OLEH ASAHAN

Diresmikannya Rumah UMKM & Pusat Oleh-oleh Asahan oleh Bupati Asahan H. Surya, BSc. Sebagai salah satu bentuk pemanfaatan BMN pada KPKNL Kisaran sekaligus wujud nyata dukungan terhadap pengembangan UMKM di Kab Asahan dan Sekitarnya



KEGIATAN LAINNYA DI TAHUN 2023

JANUARI



MONEV MANAJEMEN RESIKO



APEL PAGI PERDANA



SBSK KEJARI LABUHAN BATU



SBSK PN RANTAUPRAPAT



**JALAN SINERGI BERSAMA FORKOPIMDA
KAB. ASAHAN**



PENANDATANGANAN SKP 2023

KEGIATAN LAINNYA DI TAHUN 2023

FEBRUARI



**PUBLIC CAMPAIGN KPKNL KISARAN :
TOLAK GRATIFIKASI**



**SOSIALISASI LELANG UMKM DI RUMAH
BUMN BATU BARA**



**OBROLAN AKTUAL SHARING INFORMASI
DAN EDUKASI (OASE) PERDANA 2023**



**SOSIALISASI INSTRUKSI PRESIDEN RI
NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA
AKSI NASIONAL P4GN**



**KOORDINASI LELANG PRODUK UMKM
DENGAN DEKRANASDA BATU BARA**



**LELANG BARANG RAMPASAN NEGARA
KEJARI ASAHAN**

KEGIATAN LAINNYA DI TAHUN 2023

MARET



SOSIALISASI ANTI KORUPSI, WHISTLE BLOWING SYSTEM DAN BENTURAN KEPENTINGAN



PENILAIAN BARANG RAMPASAN KEJARI LABUHAN BATU



KOORDINASI DENGAN PROF.DR. SABRINA SELAKU DIREKTUR SEKOLAH PASCA SARJANA USU DAN PROF. DR. ELISABETH SELAKU KETUA MAGISTER MANAJEMEN PROPERTI DAN PENILAIAN USU



CEK FISIK ASET EKS KEPABEANAN DAN CUKAI DALAM RANGKA PEMUSNAHAN BMN EKS KEPABEANAN DAN CUKAI DI KPPBC TMP C TELUK NIBUNG DENGAN KANWIL DJKN SUMUT



PENGGALIAN POTENSI UMKM MINYAK VCO



PENGGALIAN POTENSI UMKM KULIT KERANG

KEGIATAN LAINNYA DI TAHUN 2023

APRIL



**PEMUSNAHAN BMN HASIL PENINDAKAN
BEA CUKAI TELUK NIBUNG (6 APR)**



**PENGGALIAN POTENSI LELANG UMKM
DAPOER OMAK DI TANJUNG BALAI**



**KOORDINASI PENYELESAIAN SERTIFIKASI BMN
DENGAN BBWS SUMATERA UTARA**



**PENANDATANGANAN MOU DENGAN
BANK MANDIRI**



**KUNJUNGAN DAN ARAHAN KAKANWIL
SUMUT KE KPKNL KISARAN**



ACARA PERPISAHAN PEGAWAI MUTASI

KEGIATAN LAINNYA DI TAHUN 2023

MEI



KUNJUNGAN KE PT.INALUM DENGAN KEMENKEU SATU DUKUNG UMKM ASAHAN



KOORDINASI KEMENKEU SATU DENGAN FORKOPIMDA TERKAIT OPTIMALISASI DANA DESA



KUNJUNGAN DIREKTUR TSI



KOORDINASI KEMENKEU SATU, PEMDA ASAHAN, DAN PELAKU UMKM ASAHAN DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI ASAHAN



KUNJUNGAN KERJA PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI KE (KPKNL) KISARAN (23 MEI)



EXIST (EXPERT SHARING SESSION AND TALK) SERI KEDUA "PENYUSUTAN ARSIP INAKTIF" (29 MEI)

KEGIATAN LAINNYA DI TAHUN 2023

JUNI



INTERNALISASI PENGUATAN INTEGRITAS



SOSIALISASI ANTI KORUPSI DAN LAYANAN PADA KPKNL KISARAN



APEL PAGI BULAN JUNI



PEMBAHASAN RKBMN



SOSIALISASI LELANG.GO.ID KEPADA PELAKU UMKM PENGRAJIN BATIK KAB. LABUHANBATU UTARA



KOORDINASI PENANGANAN PERKARA RENCANA EKSEKUSI BMN PADA KP2KP TANJUNG BALAI DENGAN KEPALA KPP KISARAN DAN KEPALA KEJAKSAAN

KEGIATAN LAINNYA DI TAHUN 2023

JULI



SOSIALISASI LELANG UMKM KEPADA MASYARAKAT PADA KEGIATAN CAR FREE DAY KOTA KISARAN



FAMILY DAY KPKNL KISARAN (9 JUL)



LELANG BARANG RAMPASAN NEGARA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI (7 JUL)



PEMILIHAN PPNPN DAN PEGAWAI TERBAIK



KOORDINASI PENANGANAN PERKARA BMN KP2KP TANJUNGBALA



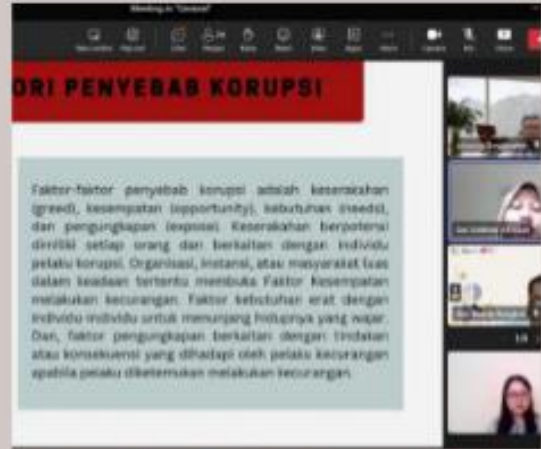
KPKNL KISARAN JALIN KERJASAMA DENGAN BRI CABANG PERDAGANGAN

KEGIATAN LAINNYA DI TAHUN 2023

AGUSTUS



EXPERT SHARING SESSION AND TALK SERI 3



PENYULUHAN BUDAYA INTEGRITAS DAN BUDAYA ANTI GRATIFIKASI



OASE AGUSTUS "BENTURAN KEPENTINGAN"



WASDAL PADA SATKER LAPAS LABUHAN BILIK



APEL PAGI BULAN AGUSTUS



UPACARA 17 AGUSTUS DENGAN KEMENKEU SATU

KEGIATAN LAINNYA DI TAHUN 2023

SEPTEMBER



KEGIATAN SURVEI OBJEK PENILAIAN BARANG RAMPASAN NEGARA PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI



KEGIATAN PENILAIAN PEMANFAATAN TANAH RUAS JALAN NASIONAL SAMPAI BATAS PROVINSI RIAU



PELAKSANAAN SURVEI PENILAIAN TANAH KPKNL KISARAN YANG DISEWA OLEH UMKM



KEGIATAN IDENTIFIKASI NOMOR RANGKA DAN MESIN PADA OBJEK PENILAIAN BARANG RAMPASAN KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU SELATAN



OASE 14 SEPT " THE USELESS CLASS"



KOORDINASI DENGAN KPPBC TELUKNIBUNG DLM RANGKA PINJAM PAKAI BMD UNTUK DERMAGA

KEGIATAN LAINNYA DI TAHUN 2023

OKTOBER



RAPAT KEMENKEU SATU DALAM PENGEMBANGAN UMKM (9 OKT)



KUNJUNGAN KERJA KAKANWIL DJKN SUMUT (18 OKT)



PEMUSNAHAN BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA (BMMN) DI KPPBC TMP C TELUK NIBUNG (19 OKT)



KOORDINASI DGN KEMENKEU SATU TERKAIT PENGELOLAN BMN DAN PEMUSNAHAN BMN BEA CUKAI



KOLABORASI DENGAN BRI DALAM LELANG EXPO 2023 (26 OKT)



KOORDINASI KEMENKEU SATU DENGAN FORKOPIMDA KAB. LABUHAN BATU (31 OKT)

KEGIATAN LAINNYA DI TAHUN 2023

NOVEMBER



SHARING KNOWLEDGE KPKNL KISARAN DALAM PENGELOLAAN BMD KAB. LABUHAN BATU UTARA (2 NOV)



OPTIMALISASI PENGURUSAN PIUTANG NEGARA



PEMANTAUAN TINDAK LANJUT PENANGANAN RISIKO LELANG



PEMANTAUAN TINDAK LANJUT PENANGANAN RISIKO PADA SEKSI PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA



SOSIALISASI LAYANAN KPKNL KISARAN DAN SOSIALISASI ANTI KORUPSI DI KABUPATEN LABUHANBATU (23 NOV)



KOORDINASI DENGAN FORKOPIMDA KOTA TJ BALAI TERKAIT OPTIMALISASI PENGELOLAAN BMD DAN BMN

KEGIATAN LAINNYA DI TAHUN 2023

DESEMBER



SURVEY LAPANGAN DALAM RANGKA PENILAIAN SEWA ASET EKS PT. PPA



PENELITIAN LAPANGAN TERHADAP PENANGGUNG HUTANG DI TJ BALAI



SOSIALISASI LELANG.GO.ID PADA UMKM DI KAB LABUHANBATU SELATAN (14 DES)



PENAGIHAN LANGSUNG PIUTANG NEGARA



KOORDINASI OPTIMALISASI BMN PADA KPP RANTAU PRAPAT



PELAKSANAAN SITE VISIT DALAM RANGKA PENYELESAIAN LIKUASI OTORITA ASAHAN DI KAB. BATU BARA

